

**PENGARUH *LEVERAGE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***



SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Rizal Auliya Ardhi

No. Mahasiswa : 19312448

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH *LEVERAGE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Rizal Auliya Ardhi

No. Mahasiswa : 19312448

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '329AKX548107327'.

329AKX548107327
Rizal Auliya Ardhi

**PENGARUH LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Rizal Auliya Ardhi

No. Mahasiswa : 19312448

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 31 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', with a stylized flourish at the end.

Johan Arifin, SE, M.Si., Ph.D., CFA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Disusun oleh : RIZAL AULIYA ARDHI

Nomor Mahasiswa : 19312448

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

PENGARUH *LEVERAGE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Rizal Auliya Ardhi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, *corporate governance*, dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria penelitian selama tahun 2017 – 2021. Penelitian ini menggunakan 245 sampel yang diperoleh berdasarkan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, komisaris independen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *leverage*, *corporate governance*, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, profitabilitas, *tax avoidance*.

***THE EFFECT OF LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, AND
PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE***

Rizal Auliya Ardhi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of leverage, corporate governance, and profitability on tax avoidance. The data used in this study were obtained from the annual financial reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) that met the research criteria for 2017 – 2021. This study used 245 samples obtained by purposive sampling. The analytical method used in this research is multiple linear regression method. Based on the results of testing the hypothesis in the study, it shows that audit quality and audit committee have a positive effect on tax avoidance, while leverage, independent commissioners, and profitability have no effect on tax avoidance.

Keywords: leverage, corporate governance, audit quality, audit committee, independent commissioners, profitability, tax avoidance.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, berkat, dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”** ini dengan baik.

Selama masa pendidikan dan proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak sehingga mampu melalui segala kendala dan hambatan yang ada. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala petunjuk, kemudahan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
3. Bapak Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFrA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan juga sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan segala arahan, bimbingan, dan ilmu kepada penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan

5. Bapak Munarso dan Ibu Titik Setyowati, selaku kedua orang tua penulis atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang, pengorbanan yang tidak ternilai, dan doa yang tidak pernah terputus kepada anaknya.
6. Nurcholis Hidayanto dan Narendra Hernandhito, selaku kakak sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan arahan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Akuntansi FBE UII atas dedikasinya dalam memberikan ilmu, dan arahan selama di perkuliahan.
8. Bapak Imam Masruri yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Seluruh teman – teman Akuntansi UII angkatan 2019 yang sudah berjuang bersama melalui masa perkuliahan. Semoga sukses selalu.
10. Teman – teman kos, yang telah memberikan bantuan dan keceriaan selama di Yogyakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis selalu berdoa semoga amal kebaikan pihak – pihak yang telah disebutkan dapat dibalas oleh Allah SWT dan tentu penulis juga berharap semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan. Mohon maaf penulis ucapkan apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis juga berharap semoga saran serta kritik yang membangun supaya dapat menjadikan

penulis lebih baik dalam menyusun penulisan berikutnya

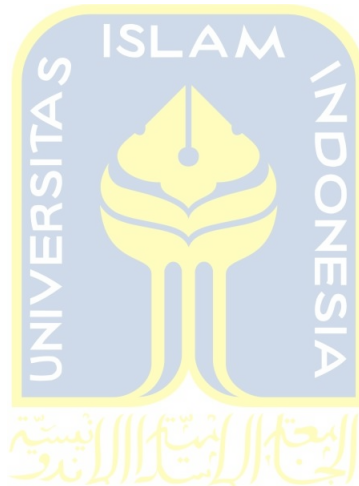
Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Juli 2023

Penulis

Rizal Auliya Ardhi

19312448



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Hipotesis Penelitian	34

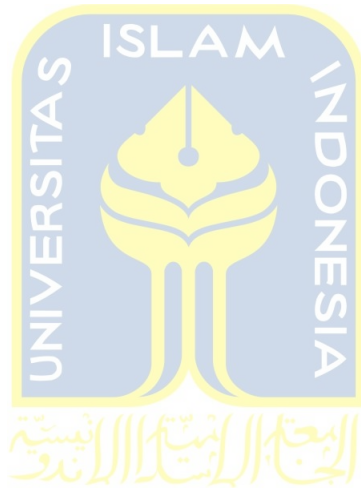
2.4 Kerangka Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Populasi dan Sampel.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	40
3.5 Metode Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Pengumpulan Data	48
4.2 Analisis Data.....	49
4.3 Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan	76
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel	48
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif The Big Four	52
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Non The Big Four	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Capaian Realisasi Penerimaan Pajak	2
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	38
Gambar 4. 1 Hasil uji scatterplot.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sampel Data Perusahaan	85
Lampiran 2 : Perhitungan Variabel <i>Tax Avoidance</i>	87
Lampiran 3 : Perhitungan Variabel <i>Leverage</i>	95
Lampiran 4 : Perhitungan Variabel Kualitas Audit.....	103
Lampiran 5 : Perhitungan Variabel Komite Audit	111
Lampiran 6 : Perhitungan Variabel Komisaris Independen	119
Lampiran 7 : Perhitungan Variabel Profitabilitas	127
Lampiran 8 : Variabel Penelitian	135
Lampiran 9 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif	147
Lampiran 10 : Hasil Uji Asumsi Klasik	148
Lampiran 11 : Hasil Analisis Regresi	150



BAB I

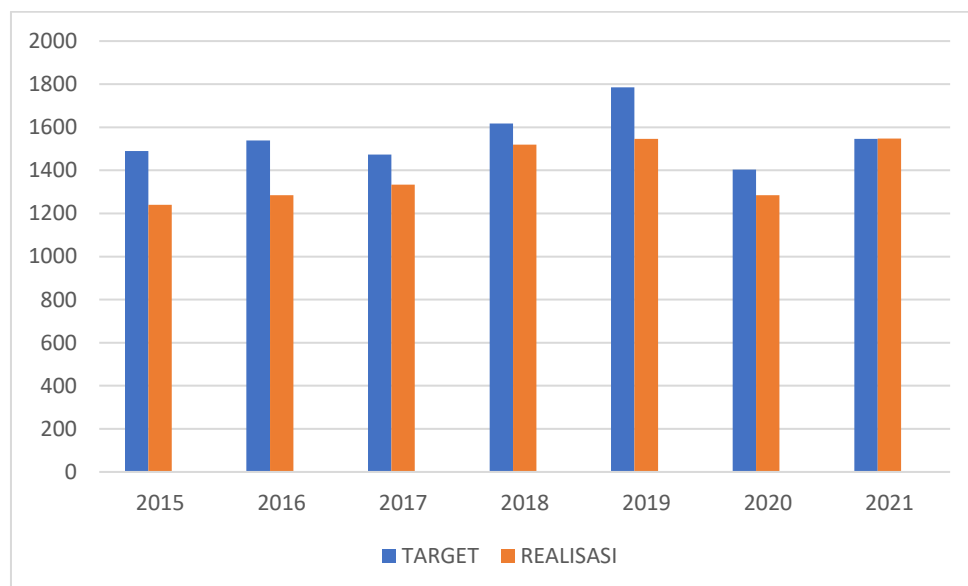
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu hal yang memaksa dan umumnya tidak diminati oleh masyarakat secara keseluruhan. Menurut sejarah, perpajakan dimulai di Mesopotamia sekitar 3300 tahun sebelum masehi. Jenis pungutan pajak yang ada pada saat itu seperti hewan ternak, budak dan emas. Penemuan dokumen tertulis ini menunjukkan bukti bahwa pajak memiliki sejarah yang panjang dan telah diterapkan sejak ribuan tahun silam. Namun dalam perjalanannya pemungutan pajak juga tak selalu berjalan mulus. Dalam penerapan pemungutan pajak di dunia sepanjang sejarahnya juga pernah mengalami pemberontakan. Revolusi Amerika adalah salah satu contoh pemberontakan dan protes pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari permusuhan koloni Amerika terhadap undang-undang parlementer Inggris yang mengenakan pajak atas *Molasses Act*, *Sugar Act*, *Stamp Act*, *Townshend Act*, dan juga *Tea Act* yang semuanya merupakan koloni Amerika. Terjadilah pemberontakan yang meliputi *Boston Tea Party*, pembantaian Boston dan Revolusi Amerika pada tahun 1775 (Darussalam, 2017). Seiring berjalannya waktu, pajak secara sosial berubah sebagai penopang keuangan negara, khususnya Indonesia. Saat ini, keuntungan adanya pajak dapat dirasakan oleh masyarakat luas seperti pemerataan fasilitas umum, bantuan sosial, ataupun subsidi.

Menurut data LKPP (2021) penerimaan pajak menyumbang 103,9% dari total realisasi penerimaan negara. Capaian penerimaan pajak tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1. Pajak masih memegang peranan yang sangat besar pada

struktur APBN Indonesia, mengenai hal itu pemerintah berharap supaya penerimaan pada sektor pajak selalu meningkat setiap tahunnya.. Namun, karena sifatnya yang memaksa, pajak sering kali kurang dapat diterima masyarakat dalam penerapannya. Selain itu, pada kenyataannya saat proses pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan adanya imbalan secara langsung dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance* (Mangoting, 1999).



Sumber : Diolah dari data LKPP 2015 - 2021

Gambar 1. 1 Grafik Capaian Realisasi Penerimaan Pajak

Tax avoidance pada umumnya dilakukan oleh wajib pajak badan dalam membantu manajemen pajak suatu perusahaan untuk memaksimalkan laba. Dalam pembayaran pajak yang terutang merupakan beban bagi suatu perusahaan, sehingga untuk memaksimalkan laba maka perusahaan berusaha untuk menekan beban ini semaksimal mungkin. Namun, selama masih direncanakan untuk menghasilkan arus kas dan laba bersih yang lebih tinggi, *tax avoidance* umumnya dianggap

menguntungkan bagi perusahaan dan pemegang saham (Blouin, 2014).

Seiring berkembangnya zaman, yang saat ini dikenal dengan zaman teknologi. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur diharapkan dapat memimpin dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Produktivitas perusahaan akan meningkat karena teknologi baru di bidang manufaktur terus bermunculan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, survei yang dilakukan Yulyanah & Kusumastuti (2019) mengungkapkan masih banyak pelaku usaha yang melakukan penggelapan pajak. Perusahaan yang menghindari pembayaran pajak mengalami kerugian sebesar \$6,48 miliar, menempatkan Indonesia di urutan ke-11 dari 30 negara yang melakukan penghindaran pajak.

Salah satu indikasi praktik *tax avoidance* di Indonesia dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel International Investama Tbk. (RMBA). Secara umum, praktik *tax avoidance* terbuka pada tahun 2016 melalui kejadian skandal *panama papers* yaitu bocornya basis data firma keuangan Mossack Fonseca yang berisi tentang dokumen kepemilikan perusahaan cangkang dan penempatan harta di negara bebas ataupun bertarif pajak rendah (*tax haven*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditemukan sebanyak 1.038 wajib pajak di Indonesia yang terdapat di bank data *panama papers* (Widyanita, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* adalah besarnya utang yang digunakan untuk sumber pendanaan aktivitas operasi perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula *cost of debt* (beban bunga) yang menjadi pengurang jumlah dasar pengenaan pajak penghasilan. *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan langkah –

langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan batasan terhadap *tax avoidance* dengan cara ini dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Pajak Penghasilan.

Penelitian terkait *leverage* terhadap *tax avoidance* juga telah dilakukan di Indonesia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk. (2016) menunjukkan jika *leverage* diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Kurniasih & Ratna Sari (2013) melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sementara itu, Swingly & Sukartha (2015) melakukan penelitian dan menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Setiawan & Al-Ahsan (2016) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *effective tax rate* (ETR). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat utang tentunya akan semakin rendah ETR, yang artinya *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sama halnya dengan yang dilakukan (Pratiwi, dkk., 2020)

Selain *leverage*, variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki arti suatu sistem atau pengaturan yang memberi nilai tambah bagi *stakeholders* dan juga *shareholders* sebagai pengatur dan pengendali perusahaan (Saputra, dkk., 2015). Dalam penelitian ini, *corporate governance* diproksikan dengan kualitas audit, komite audit dan komisaris independen yang dianggap mewakili prinsip-prinsip *corporate governance*.

Studi berkaitan dengan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* sudah pernah ada yang dilakukan di Indonesia. Seperti penelitian Sundari & Aprilina (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Mulyani, dkk. (2018) yang memaparkan bahwa komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain *leverage* dan *Corporate Governance* ada juga variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Cara mengetahui Profitabilitas suatu perusahaan yaitu dengan menghitung rasio profitabilitas perusahaan. Dalam rasio profitabilitas terdapat pengukuran tingkat efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan. Mahpudin (2016) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur atau mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai aktivitas.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa variabel bebas pada penelitian ini, yaitu profitabilitas. Penelitian ini dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Cahyono, dkk. (2016) yang menunjukkan profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap tax

avoidance. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, diputuskan bahwa judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Leverage*, *Corporate Governance*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meneliti secara empiris pengaruh *leverage*, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

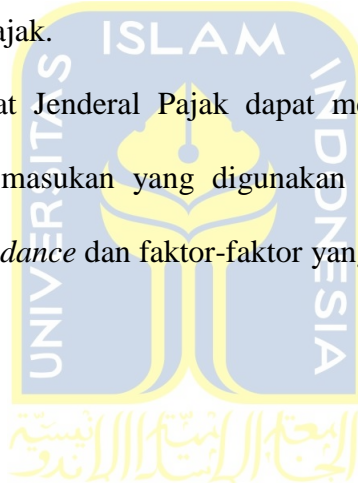
Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *leverage*, *corporate governance*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Memberikan wawasan serta informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan dapat digunakan untuk memberikan bahan masukan sehingga perusahaan mampu lebih baik dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi bahan analisis sebagai sarana bahan masukan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan terkait *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut pernyataan dari Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana pemilik perusahaan (*prinsipal*) melibatkan *agency* (manajemen) dalam melakukan tugas sesuai kepentingan prinsipal dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (manajemen). Sementara agen melaksanakan keinginan prinsipal melalui tugas-tugas tertentu, pemilik perusahaan berkewajiban memberi kompensasi kepada agen. Kumalasari & Sudarma (2013) menyatakan teori keagenan merupakan pembahasan tentang isu-isu yang muncul ketika individu satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan akan memicu timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara manajemen dan pemilik perusahaan atau yang sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Dengan kondisi seperti ini, pihak manajemen selaku pemegang kendali atas operasional perusahaan cenderung memiliki lebih banyak informasi penting mengenai perusahaan secara keseluruhan daripada pemilik perusahaan. Disisi lain, informasi dari manajemen sangat dibutuhkan pemilik perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen atau lebih dikenal dengan asimetris informasi (*asymmetric information*).

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa penanggung pajak bagi wajib pajak badan adalah pengurus. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) UU KUP yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak pihak ketiga dan cek. Secara bisnis pada umumnya, apabila merujuk pada penjelasan tersebut dan sejalan dengan konsep hubungan keagenan maka yang dimaksud pengurus di sini adalah manajemen perusahaan. Artinya, risiko sebagai penanggung pajak badan lebih besar melekat pada manajemen daripada pemilik perusahaan. Waktu dan biaya yang timbul untuk memitigasi risiko yang harus ditanggung oleh manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan merupakan *bonding cost*.

Lain halnya jika manajemen merasa kepentingannya tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini memicu manajemen untuk berjuang mempertahankan hak-hak individunya, sehingga mendorong untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri meskipun dapat menimbulkan kerugian seperti penurunan nilai perusahaan. Kerugian atas penurunan nilai perusahaan yang diakibatkan oleh perbedaan keputusan antara manajemen dan pemilik perusahaan inilah yang disebut dengan *residual cost*.

2.1.2 Teori Trade Off

Teori *trade-off* dikemukakan oleh Myers (2001) yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan penambahan utang sampai batas tertentu di mana

penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang (*leverage*) sama dengan *present value* dari biaya kesulitan keuangan (*cost of financial distress*). Teori ini menjelaskan bahwa manajemen dalam hal pengambilan keputusan berpikir dalam kerangka *trade off*, yaitu antara biaya *financial distress* dan penghematan pajak. Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan menambah utang maka semakin besar pula biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak. Hal tersebut berarti perusahaan melakukan penghematan pajak dengan menambah tingkat *leverage*.

Selama manfaat penghematan pajak lebih besar dibandingkan biaya yang muncul atas penggunaan utang maka tambahan utang akan diperkenankan sebagai struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut teori *trade-off*, perusahaan akan berusaha mengurangi beban pembayaran pajak atau melakukan *tax avoidance* dengan meningkatkan *leverage* mereka ke titik tertentu untuk membiayai modal kerja perusahaan.

2.1.3 Tax Avoidance

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) *tax avoidance* mengacu pada aktivitas yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh peraturan atau undang-undang perpajakan yang ada.

Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan *tax avoidance* secara luas mencakup semua transaksi yang secara eksplisit mengakibatkan pengurangan pajak. Richardson, dkk., (2015) mengatakan *tax avoidance* melibatkan penataan transaksi sedemikian rupa yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan atau perbedaan undang-undang perpajakan antar yurisdiksi sehingga secara

signifikan menurunkan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan beberapa definisi *tax avoidance* di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan aktivitas pengaturan keuangan perusahaan yang dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak dengan jumlah yang lebih besar secara *legal* dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Meski begitu, pada praktik pemungutan pajak selalu kurang dapat diterima oleh masyarakat karena pajak bersifat memaksa. Selain itu, pada kenyataannya dalam pembayaran perpajakan tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah yang menjadi salah satu faktor penyebab wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan istilah *tax aggressiveness*, *tax planning*, dan *tax sheltering* merupakan alternatif bagi *tax avoidance* dengan proksi pengukuran yang sama. Beberapa pengukuran *tax avoidance* yang digunakan diantaranya :

- a) Effective Tax Rate (ETR), rasio ditentukan dengan membandingkan beban pajak terhadap laba sebelum pajak.
- b) Cash Effective Tax Rate (CETR), rasio yang ditentukan dengan membandingkan pajak tunai yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.
- c) Long Run Cash Effective Tax Rate (CETR 5), rasio ditentukan dengan membandingkan jumlah pajak tunai yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak selama lima tahun sebelumnya.
- d) Book Tax Difference (BTD), rasio yang dihitung dari selisih antara laba

akuntansi dan laba berdasarkan pajak dibagi dengan total aset

2.1.4 Leverage

Financial leverage, seperti yang didefinisikan oleh Rehman (2013) menunjukkan sejauh mana bisnis perusahaan dibiayai melalui dana pinjaman. Sementara itu, menurut Pranjoto (2013) *financial leverage* merupakan bagian dari penggunaan utang untuk membiayai investasi. Al-Ghusin (2015) menyebutkan *leverage* adalah biaya yang diperoleh dari pihak luar seperti sektor pasar modal, bank, lembaga keuangan, ataupun pasar uang dan digunakan untuk membiayai aset

Leverage digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya. Akibatnya, hal tersebut dapat menguntungkan para pemegang saham. Pada penelitian – penelitian terdahulu *leverage* diprosikan dengan beberapa rasio keuangan diantaranya:

- a) *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio perbandingan antara jumlah uang dan ekuitas pemegang saham. Menurut Pranjoto, (2013) DER dapat dilihat pada setiap rupiah dari modal sendiri yang dijadikan jaminan atas seluruh utang.
- b) *Debt Ratio*, rasio total aset terhadap total hutang. Aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman ditunjukkan dengan debt ratio.
- c) *Time Interest Earned Ratio*, rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap biaya bunga. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dapat menanggung manfaat yang berkurang tanpa menghadapi tantangan moneter karena tidak dapat membayar bunga atau mengukur kapasitas perusahaan untuk menanggung biaya bunga (Pranjoto, 2013).

2.1.5 *Corporate governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar dan secara benar (*doing the right things right*). Menurut Sandy & Lukviarman (2015) konsep dari *corporate governance* yaitu memprioritaskan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar supaya tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Terdapat lima prinsip tata kelola yang jika diterapkan dengan benar akan berdampak positif bagi *stakeholder* dan dapat menghasilkan terwujudnya keadilan dalam suatu sistem yang cakupannya lebih luas dan berinteraksi dengan sistem lainnya (Sandy & Lukviarman, 2015). Prinsip - prinsip *corporate governance* tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Akuntabilitas**

Prinsip tanggung jawab dari manajemen melalui aktivitas perusahaan yang dipantau oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti pemegang saham, auditor, dan komisaris independen. Sehingga pengaruh informasi pada laporan keuangan sesuai dengan peristiwa yang telah terjadi.

2) **Independensi**

Perusahaan yang dikelola secara mandiri tanpa adanya kuasa lain atau intervensi serta intimidasi oleh suatu pihak, sehingga *corporate governance* dapat berjalan dengan baik.

3) **Kewajaran dan kesetaraan**

Dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholder dan pemangku kepentingan* lain dalam perusahaan

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4) Tanggung Jawab

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menjalankan tanggung jawabnya. Pemegang saham memiliki hak untuk dapat diakui berdasarkan legalitas hukum yang berlaku dan dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan dan kondisi keuangan perusahaan yang baik.

5) Transparansi

Perusahaan wajib menyediakan data yang jelas, relevan dan harus dapat diakses oleh para *stakeholder*. Termasuk hal penting yang dilakukan dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.

2.1.6 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala potensi yang dapat terwujud ketika para auditor melakukan pengauditan laporan keuangan milik kliennya dan ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, serta melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit (Maharani & Suardana, 2014). Menurut pernyataan Saputra, dkk. (2015) laporan keuangan yang berkualitas adalah yang telah diaudit dengan benar dan menunjukkan keadaan *real* pada suatu perusahaan, pihak yang dipercaya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan audit dengan baik yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki label *The Big Four*.

2.1.7 Komite Audit

Menurut Winata (2014) yang dimaksud dengan komite audit adalah beberapa

kumpulan orang yang terpilih melalui anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan serta pengungkapan. Komite audit juga dipercaya untuk memberikan bantuan kepada komisaris independen untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kegiatan pelaporan keuangan. Sebuah informasi yang memiliki kualitas dan tingkat efektivitas kinerja yang baik akan tercapai karena pengawasan yang ketat kepada manajemen perusahaan menurut (Hanum & Zulaikha, 2013).

2.1.8 Komisaris Independen

Menurut Zemzem & Ftouhi (2013) komisaris independen adalah orang yang tidak berkaitan pada segala hal dengan para pemilik saham, jajaran direksi, ataupun dewan komisaris dan juga tidak memiliki jabatan sebagai direktur pada perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan BAPEPAM No: KEP, 2000, 315/BEJ/06 mengharuskan ada setidaknya tiga puluh persen (30%) komisaris independen di antara semua jumlah komisaris. Persentase di atas 30 persen menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *corporate governance* dapat diterapkan dengan baik sehingga keinginan dari pihak manajemen untuk menurunkan biaya agensi dan menghemat pajak dapat dikendalikan, sehingga mendorong perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

2.1.9 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi dan diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengejar laba dan menjelaskan mengenai ukuran efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Selain itu, Mahpudin (2016) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai aktivitas. Adapun jenis penghitungan rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut Hery (2018) diantaranya:

- a) *Return on Assets*, rasio ini mengukur besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Diukur dengan membagi laba bersih dengan total aset
- b) *Return on Equity*, rasio ini mengukur besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Diukur dengan membagi jumlah laba bersih dengan total ekuitas (*Gross Profit Margin*), adalah rasio yang digunakan untuk menghitung rasio laba kotor terhadap penjualan bersih. Bagilah penjualan bersih dengan laba kotor untuk sampai pada rasio ini. Pengurangan penjualan bersih dan harga pokok penjualan inilah yang digunakan untuk menghitung laba kotor.
- c) *Operating Profit Margin*, adalah rasio yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasi terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan laba operasi.
- d) *Net Profit Margin*, adalah rasio yang digunakan untuk menentukan proporsi penjualan bersih terhadap laba bersih. Rasio ini didapat dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan, penelitian Pengaruh *Leverage*, *Corporate Governance*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* sudah beberapa kali dilakukan dan hasilnya pun berbeda-beda. Berikut ini uraian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Penelitian Sandy & Lukviarman (2015) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini didapat dari data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Hasil penelitian menyebutkan bahwa proporsi dari komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara kepemilikan institusional tidak dianggap sebagai penentu *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Selanjutnya penelitian Saputra, dkk. (2015) tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang terdaftar pada BEI. Pada penelitian ini *corporate governance* menggunakan tiga proksi yaitu dewan komisaris, kualitas audit, dan audit komite. *Tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Penelitian ini dilakukan pada 38 perusahaan properti, *real estate*, *building construction* yang terdaftar dalam BEI di tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan audit komite tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan *return on assets* dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati, (2016) mengenai pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan tambang dan perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, pengungkapan tanggungjawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Marfirah & Syam (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk. (2016) tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 perusahaan perbankan terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2011-2013. Hasil dari penelitian menunjukkan komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wibawa, dkk. (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh persentase dewan komisaris

independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan, (2016) tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability* sampling yaitu teknik purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ariawan & Setiawan (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sektor jasa di BEI pada tahun 2012-2014. Pada penelitian ini variabel *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), sedangkan dewan komisaris independen dilambangkan dengan (KOM), dan *leverage* diukur menggunakan *debt*

to equity ratio (DER). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa variabel dewan komisaris independen dianggap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dianggap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eksandy, (2017) tentang Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014. Dengan metode purposive sampling ada 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dan menggunakan analisis regresi linear berganda (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Putri & Chariri (2017) meneliti tentang pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 sebanyak 399 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, oleh karena itu dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sundari & Aprilina (2017) mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan

corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial yang diukur dari total saham manajer dibagi dengan total saham beredar, dan kualitas audit diukur dengan perusahaan yang diaudit oleh *The Big Four* diberi nilai 1 dan jika diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selain *The Big Four* diberi nilai 0. Pada penelitian ini kualitas audit diberi simbol dengan BIG_AUD. Sementara *Tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate*. Penelitian ini dilakukan terhadap 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Artinasari & Mildawati, (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2016. Teknik pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan *consumer goods* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo, (2018) tentang

pengaruh komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 sebanyak 8 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, sedangkan kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Mulyani, dkk. (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (perusahaan pertambangan pada BEI). *Corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan *cash effective tax rate* (ETR). Populasi dari penelitian ini berasal dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada rentang waktu 2014-2016 sebanyak 46 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya Permata, dkk, (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh *size, age, profitability, leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Populasi dari penelitian ini berasal dari perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI pada rentang waktu 2012-2016 diperoleh sebanyak 32 sampel perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *size, age, profitability, leverage, dan sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berikutnya penelitian terdahulu oleh Suryani & Mariani (2019) tentang pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* digunakan sebagai variabel independen sekaligus pemoderasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 70 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2014-2017. Diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lain dilakukan Fauzan, dkk. (2019) dengan judul *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance* Populasi dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda dengan hasil penelitian *Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ardianti, (2019) tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh 14 perusahaan manufaktur. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Implikasi teoritis penelitian ini yaitu dapat menjadi sumber referensi penelitian yang berkaitan dengan aktivitas *tax avoidance*.

Berikutnya, penelitian dari Noviyani & Muid (2019) dengan judul Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan menggunakan sampel 72 perusahaan manufaktur sebagai terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017. Hasilnya memperlihatkan *Return on assets*, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Triyanti, dkk. (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Size*, *Leverage*, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 30 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pratiwi, dkk. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2016. Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Hasil dari penelitian ini yaitu *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hidayah, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan 12 perusahaan pada BEI periode 2016-2018. Hasil dari penelitian ini profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Monika & Noviani (2021) tentang pengaruh *financial distress*, intensitas modal, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel pada 47 perusahaan pertambanganyang ada di BEI tahun 2015-2019. Hasilnya memperlihatkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Terakhir penelitian dari Hidayanto, dkk. (2021) tentang pengaruh *financial distress* dan *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan 68 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2015 – 2019. Pada penelitian ini *financial distress* diukur menggunakan EMS, sedangkan *leverage* menggunakan DER, dan *tax avoidance* menggunakan ETR. Hasil penelitian ini menyebutkan *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sandy & Lukviarman (2015)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komisaris Independen, dan Komite Audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen, kualitas audit, dan juga komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara kepemilikan institusional tidak dianggap sebagai penentu <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur Indonesia.
2.	Saputra, dkk. (2015)	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite tidak mempengaruhi secara signifikan <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, <i>return on assets</i> dan karakter eksekutif secara signifikan mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .
3.	Maraya & Yendawati (2016)	Variabel Independen: Kualitas audit, Kepemilikan institusional, dan Pengungkapan tanggungjawab sosial Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, pengungkapan tanggungjawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Marfirah & Syam (2016)	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, Dewan komisaris, Kualitas audit, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Cahyono, dkk. (2016)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Wibawa, dkk. (2016)	Variabel Independen: Dewan komisaris independen, Komite audit perusahaan, dan Kualitas auditor eksternal Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Dewinta & Setiawan (2016)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan penjualan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	Ariawan & Setiawan (2017)	Variabel independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Eksandy (2017)	Variabel Independen: Komisaris independen, Komite audit, dan Kualitas audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Putri & Chariri (2017)	Variabel independen: Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, <i>Financial Distress</i> , Dewan Direksi dan Dewan Komite Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> memiliki pengaruh positif signifikan dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan dewan direksi memberikan hasil yang positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , maka dewan komite dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
11.	Sundari & Apriliana (2017)	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	Artinasari & Mildawati (2018)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital intensity</i> dan <i>Inventory intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, <i>inventory intensity</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ,

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13.	Nugraheni & Pratomo (2018)	Variabel Independen: Komite audit, Kualitas audit, dan Ukuran perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan arah negatif, sedangkan kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
14.	Mulyani, dkk. (2018)	Variabel Independen: Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Komisaris Independen Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
15.	Permata, dkk. (2018)	Variabel Independen: <i>Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales growth</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Size, age, profitability, leverage, dan sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
16.	Suryani & Mariani (2019)	Variabel Independen: Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan,	Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Profitabilitas, <i>Leverage</i> Variabel Pemoderasi: <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> mampu memoderasi pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> , namun <i>leverage</i> tidak mampu memoderasi profitabilitas dan <i>tax avoidance</i> .
17.	Fauzan, dkk. (2019)	Variabel Independen: <i>Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth.</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Audit committee, leverage, return on assets, company size, and sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
18.	Ardianti (2019)	Variabel Independen: Profitabilitas, Komite audit, dan <i>leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
19.	Noviyani & Muid (2019)	Variabel Independen: <i>Return on assets, leverage</i> , Intensitas aset tetap dan Kepemilikan institusional Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on assets, leverage</i> , intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
20.	Triyanti, dkk. (2020)	Variabel Independen: Profitabilitas, Komite audit, Komisaris independen, <i>Size, Leverage</i> , dan Umur perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>size, leverage</i> , dan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
21.	Pratiwi, dkk. (2020)	Variabel Independen: Financial Distress, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
22.	Hidayah, dkk. (2020)	Variabel Independen: Profitabilitas, Intensitas modal, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, dan Komisaris independen Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
23.	Monika & Noviari (2021)	Variabel Independen : <i>Financial Distress, Capital Intensity, Audit</i> <i>Quality</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
24.	Hidayanto, dkk. (2021)	Variabel Independen: <i>Financial Distress, Accounting Conservatism,</i> <i>dan Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa <i>financial</i> <i>distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> , <i>accounting conservatism</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Hasil kajian penulis, 2023

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Sebagaimana diuraikan dalam teori *trade off* struktur modal, perusahaan dapat memaksimalkan *leverage* hingga pada titik tertentu untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Penambahan utang dapat terus dilakukan hingga titik tertentu untuk mengoptimalkan penghematan pajak. Biaya bunga atas utang akan menekan besarnya beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Dharma & Ardiana (2016) mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* dan hasilnya adalah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan, jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang lebih tinggi, maka perusahaan akan berusaha mencari cara untuk melunasi beban bunga atas utang. Bunga atas utang tersebut akan menjadi fokus perusahaan untuk diselesaikan pembayarannya sehingga kecil potensi perusahaan merencanakan strategi penghindaran pajak. Namun, temuan penelitian yang dilakukan oleh Hidayanto, dkk. (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai utang yang hanya digunakan dalam rangka pembiayaan modal perusahaan. Maka dari itu, hipotesis pertama penelitian ini yaitu :

H1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Kualitas audit ditinjau melalui pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan, peninjauan tersebut biasanya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP dengan label *The Big Four* dianggap mempunyai kemampuan yang lebih dalam melakukan pengauditan laporan keuangan dengan baik dikarenakan

menggunakan staf ahli yang dianggap sudah berkompeten pada bidangnya dan risiko yang akan terjadi kemungkinan dapat diminimalisir. Semakin baik hasil dari kualitas audit maka *tax avoidance* yang akan terjadi dapat dikurangi dikarenakan laporan keuangan yang diperiksa dilakukan dengan semakin ketat dan semakin banyak proporsi anggota komite audit maka pengauditan yang dilaksanakan dapat memiliki kualitas yang baik (Sandy & Lukviarman, 2015). Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, manajemen memiliki insentif yang lebih rendah untuk terlibat dalam aktivitas *tax avoidance* yang berisiko tinggi dan berpotensi merugikan pemegang saham. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan aturan perpajakan yang ada di Indonesia masih terlalu kompleks, sehingga sebaik apapun kualitas audit pasti akan ada celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak. Maka dari itu, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu :

H2 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit bertanggung jawab untuk memberikan masukan atau pendapat tambahan mengenai *internal control*, akuntansi, dan kebijakan keuangan supaya perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menjalankan tugas *controlling* yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memuat ketentuan mengenai jumlah minimum anggota komite audit yaitu tiga orang (Sandy & Lukviarman, 2015). Menurut penelitian dari Wibawa, dkk. (2016) menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance* karena semakin banyak jumlah anggota komite audit akan mempengaruhi keputusan perusahaan seperti mengurangi beban pajak. Hal ini dimungkinkan karena komite audit merupakan bagian internal perusahaan dan akan mendukung segala keputusan yang dianggap menguntungkan perusahaan seperti halnya *tax avoidance*. *Tax avoidance* dianggap sebagai suatu hal yang legal dilakukan karena tidak melanggar undang undang dan hanya memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit maka peluang terlaksananya *tax avoidance* akan semakin besar karena hal tersebut akan menguntungkan perusahaan. Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik saham mayoritas baik secara hubungan keluarga ataupun hubungan bisnis. Komisaris independen diatur untuk menyeimbangkan suatu keputusan perusahaan saat melakukan pengawasan terhadap suatu manajemen saat proses pengambilan suatu kebijakan agar tidak memihak serta tetap patuh dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perilaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat berkurang. Ariawan & Setiawan (2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa proporsi komisaris independen berdampak negatif terhadap *tax avoidance* karena penghindaran pajak akan menurun jika proporsi anggota komisaris independen meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan Maraya & Yendrawati (2016) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota komisaris

independen menunjukkan sikap independensinya. Maka dari itu, hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu:

H4 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.5 Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

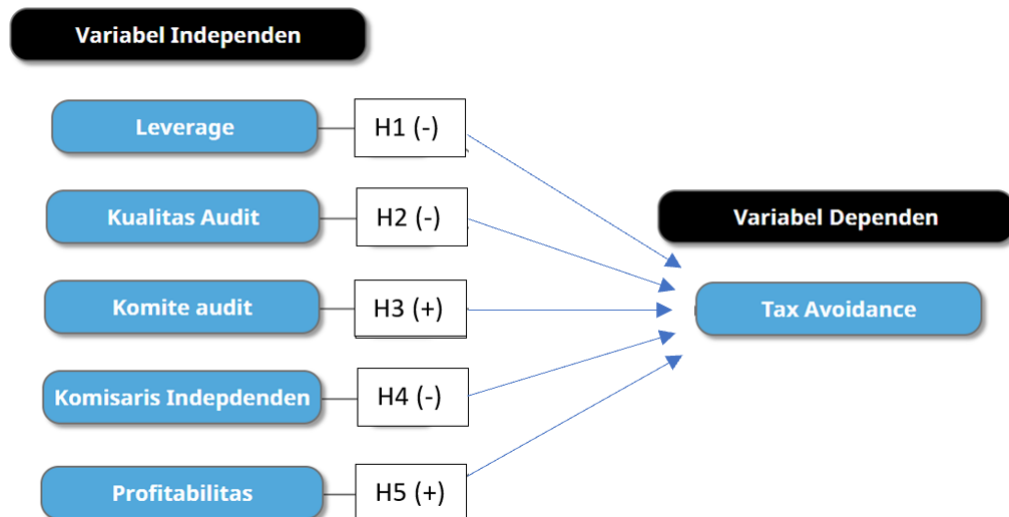
Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan perusahaan (Hery, 2018). Penelitian ini dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Tingginya profitabilitas juga menunjukkan tingginya keuntungan yang dihasilkan perusahaan, hal tersebut akan mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan akan semakin tinggi juga. Karena hal tersebut manajer sebagai pengelola sebuah perusahaan akan berusaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan harapan bisa meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun, temuan penelitian yang dilakukan Permata, dkk. (2018) yang mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena beresiko akan kehilangan reputasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis kelima pada penelitian ini yaitu:

H5: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *leverage*, *corporate governance*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan yang sudah diuraikan

sebelumnya, maka dikembangkan hipotesis penelitian dalam Gambaran hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui kerangka penelitian sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian kali ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dan mengalami perkembangan bisnis dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur dijadikan sebagai populasi penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI per 31 Desember 2021
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun 2017-2021 secara lengkap
3. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2017-2021
4. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan penelitian yang diperlukan selama tahun 2017-2021

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif, atau dapat dikatakan penelitian memakai data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2021 yang diperoleh melalui

website resmi BEI yaitu www.idx.co.id atau dapat juga dengan cara mengunduh melalui *website* resmi perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan teknik dokumentasi dengan mengkaji laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2017-2021. Dokumen-dokumen tersebut dapat diunduh dari *website* BEI www.idx.co.id atau dari *website* perusahaan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Perhitungan dari data yang telah terkumpul digunakan untuk mendapatkan data *effective tax rate* (ETR), *debt to equity ratio* (DER) dan *return on assets* (ROA).

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Selain itu, menurut Sugiyono (2016) variabel dependen juga biasa disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen, atau terikat. Pada penelitian ini *tax avoidance* menjadi variabel dependen.

Tax avoidance merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dengan cara memanfaatkan peluang dari aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku supaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir (Sandy & Lukviarman, 2015). Metode pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini memakai *Effective Tax Rate* (ETR). Penghitungan ETR dapat dilakukan dengan membagi total pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

ETR berbanding terbalik dengan tingkatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dalam artian semakin besar nilai ETR yang dihasilkan maka semakin kecil tingkat *tax avoidance* yang ada pada suatu perusahaan. Maka dari itu, untuk mempermudah interpretasi hasil pengukuran, dalam penelitian ini ETR dikali dengan negatif satu (-1) (Hidayanto, dkk., 2021).

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*, atau bebas (Sugiyono, 2016).

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

1. Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat utang yang menjadi sumber dana aktivitas operasi pada perusahaan. *Leverage* dihitung melalui *debt to equity ratio* karena sejalan dengan langkah pemerintah dalam membatasi modus penyalahgunaan *tax avoidance* dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Pajak Penghasilan.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

2. Kualitas Audit

Kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan sangat terpengaruh dengan kualitas audit. Kualitas audit yaitu segala sesuatu yang dapat memungkinkan terjadinya temuan kesalahan hukum atau pelanggaran aturan ketika auditor memeriksa laporan keuangan. Kualitas audit dilakukan pengukuran dengan menggunakan skala nominal menggunakan variabel *dummy*, angka 1 digunakan untuk sebagai simbol perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dan angka 0 digunakan sebagai simbol perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *The BigFour* (Annisa & Kurniasih, 2012).

3. Komite Audit

Komite audit adalah orang yang dipilih oleh anggota dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab terhadap mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Winata, 2014). Variabel komite audit diukur dengan cara membagi jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang selanjutnya dikali seratus persen (Djefris, dkk., 2018).

4. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan orang-orang yang memelihara kestabilan keputusan atau keseimbangan dewan komisaris pada suatu perusahaan supaya tidak terjadi keberpihakan dengan melakukan pengawasan. Variabel komisaris independen diukur dengan menggunakan pembagian antara jumlah dewan komisaris independen dengan anggota dewan komisaris dikali seratus persen (Djefris, dkk., 2018).

5. Profitabilitas

Pengertian profitabilitas atau yang sering disebut dengan rasio profitabilitas merupakan matriks keuangan yang dipakai investor dan juga analis untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa mampu sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan. Profitabilitas diukur menggunakan proksi ROA, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan akan membuat tingkat profitabilitas perusahaan juga lebih tinggi sehingga beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak yang terlihat seperti melakukan tindakan *tax avoidance*

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan lebih dari satu variabel independen.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengGambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa memiliki maksud untuk membuat kesimpulan secara umum. Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan data yang komunikatif dengan melihat Gambaran data penelitian. Gambaran data penelitian akan disajikan dalam bentuk *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari tiapvariabel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam analisis regresi. Persyaratan tersebut dikenal dengan BLUE (*Blue, Linear, Unbiased, Estimated*). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Data uji normalitas pada penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data pada penelitian memiliki distribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya *Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov*, dan *Jarque-Bera*.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ariawaty & Evita (2018) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah variabel independen yang digunakan pada model regresi saling memiliki korelasi. Pengujian ini menggunakan kriteria yaitu uji *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$, maka dapat dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu pula sebaliknya.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi atau tidak antara residual pada periode saat ini (t) dengan residual di periode sebelumnya ($t-1$). Regresi dapat disebut sempurna jika didalamnya tidak mengandung autokorelasi. Uji autokorelasi dapat diuji dengan uji Durbin-Watson (DW).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ariawaty & Evita (2018) Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan baik jika tidak mengandung heteroskedastisitas, untuk mendeteksinya dapat menggunakan menggunakan uji *glejser*, uji *park*, uji *spearman-rho*, uji *white* dan uji *scatterplot*. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas akan menggunakan uji *white* dan uji *scatterplot*.

3.5.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan setelah syarat melakukan uji asumsi klasik terselesaikan. Uji hipotesis adalah uji analisis statistik yang memiliki tujuan untuk mengukur koefisien determinasi, nilai uji F, dan nilai uji t. Uji hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, selain itu juga untuk mengetahui secara proporsi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas.

3.5.3.2 Uji F

Menurut Ghozali (2018) menentukan signifikan atau tidaknya model dapat dilakukan dengan pengujian uji F. Pengujian uji F memiliki tujuan guna menguji

apakah model layak digunakan dan dapat memperkirakan penggunaan dari model regresi. Jika nilai Sig < 0,05, maka model regresi linear berganda tersebut dapat dilanjutkan karena tidak mengalami kendala.

3.5.3.3 Uji Regresi Linear Berganda

Pada penelitian Saputra, dkk. (2015) dijelaskan bahwa untuk regresi linear berganda, variabel independen yang terdapat pada penelitian lebih dari satu, sedangkan variabel dependen hanya satu. Pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen diuji menggunakan regresi linear berganda. Berikut ini merupakan persamaan regresinya :

$$TA = \alpha + \beta_1 Lev + \beta_2 QA + \beta_3 KOMAU + \beta_4 KOMIN + \beta_5 Profit$$

Keterangan :

TA	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi
Lev	= <i>Leverage</i>
QA	= Kualitas Audit
KOMAU	= Komite Audit
KOMIN	= Komisaris Independen
Profit	= Profitabilitas

3.5.3.4 Uji t

Pada dasarnya uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig < 0,05 dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh signifikan

secara parsial terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian kali ini yaitu menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Berdasarkan populasi tersebut, pemilihan data dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Jika sudah dilakukan pemilihan sampel data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan. Berikut ini merupakan distribusi sampel data yang ditunjukkan melalui Tabel 4.1 :

Tabel 4. 1 Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI per 31 Desember 2021	216
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2017-2021 secara lengkap	(80)
3.	Perusahaan yang mengalami rugi selama tahun 2017-2021	(60)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan selama tahun 2017-2021	(27)
Jumlah sampel perusahaan		49
Jumlah tahun		5
Jumlah data sampel		245

Sumber : Hasil olah data

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif telah dilakukan menggunakan variabel *tax avoidance*, *leverage*, *financial distress*, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen. Untuk variabel independen yaitu kualitas audit, pengujian statistik deskriptifnya dilakukan dengan cara terpisah dikarenakan menggunakan skala *dummy*.

a. Seluruh Sampel Penelitian

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	245	-0,559	-0,020	-0,24053	0,061903
Lev	245	0,067	3,413	0,71457	0,555219
QA	245	0	1	0,39	0,488
KOMAU	245	0,33	1,67	0,8432	0,33928
KOMIN	245	0,25	0,83	0,4215	0,11178
Profit	245	0,012	0,527	0,09561	0,080266
Valid N (listwise)	245				

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Keterangan: TA=Tax Avoidance, Lev=Leverage, QA=Kualitas Audit, KOMAU=Komite Audit, KOMIN=Komisaris Independen, Profit=Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh data analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance yang diukur menggunakan ETR dikali dengan negatif satu, memiliki rata – rata sebesar -0,24053, artinya dari sampel 49 perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata ETR yang dikali dengan negatif satu sebesar -0,24053. Untuk nilai maksimum *tax avoidance* sebesar -0,020, artinya ETR tertinggi adalah sebesar -0,020 yaitu didapat dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) pada tahun 2018. Sedangkan, nilai minimum *tax avoidance* sebesar -0,559, artinya nilai ETR terendah adalah sebesar -0,559 yang terdapat pada PT Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2018. Standar deviasi *tax avoidance* sebesar 0,061903 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data tersebut tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

2. *Leverage*

Leverage yang diukur dengan DER, memiliki rata - rata sebesar 0,71457, artinya dari sampel 49 perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata DER sebesar 0,71457. Untuk nilai maksimum *leverage* sebesar 3,413, artinya ETR tertinggi adalah sebesar 3,413 yaitu berasal dari PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,067, artinya nilai ETR terendah adalah sebesar 0,067 yang didapat dari PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. (SCCO) pada tahun 2021. Standar deviasi data *leverage* sebesar 0,555219 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data *leverage* yang diukur dengan DER memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

3. Komite Audit

Komite audit memiliki rata – rata sebesar 0,8432 artinya dari sampel 49 perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata komite audit sebesar 0,8432. Untuk nilai maksimum komite audit sebesar 1,67, artinya nilai tertinggi jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 1,67 yang berasal dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) tahun 2017. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,33, artinya nilai terendah jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 0,33 didapat dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2020 - 2021. Standar deviasi komite audit sebesar 0,33928. lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komite audit memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

4. Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki rata – rata sebesar 0,4215, artinya dari sampel 49 perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,4215. Untuk nilai maksimum yaitu sebesar 0,83, artinya nilai tertinggi jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,83 yang diperoleh dari PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2020 – 2021. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 0,25, artinya nilai terendah jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,25 yang diperoleh dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2017. Untuk standar deviasi komisaris independen sebesar 0,11178 lebih tinggi dibandingkan

nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komisaris independen tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

5. Profitabilitas

Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki rata – rata sebesar 0,09561, artinya dari sampel 49 perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata ROA sebesar 0,09561. Untuk nilai maksimum ROA yaitu sebesar 0,527, artinya ROA tertinggi adalah sebesar 0,527 yaitu didapat dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2017. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,012, artinya ROA terendah adalah sebesar 0,012 yang diperoleh dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) pada tahun 2017. Untuk standar deviasi profitabilitas sebesar 0,080266 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data profitabilitas yang diukur menggunakan ROA tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

b. Sampel Dengan Kualitas Audit *The Big Four*

Kualitas audit *The Big Four* pada penelitian kali ini menggunakan skala *dummy* yaitu angka 1. Berikut deskripsi hasil terkait variabel penelitian tersebut :

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif The Big Four

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	95	-0,400	-0,023	-0,25061	0,056148
Lev	95	0,122	3,413	0,78508	0,708465
QA	95	1	1	1,00	0,000
KOMAU	95	0,33	1,67	0,6989	0,30825

KOMIN	95	0,25	0,83	0,4233	0,12210
Profit	95	0,023	0,527	0,13176	0,100917
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Keterangan: TA=Tax Avoidance, Lev=Leverage, QA=Kualitas Audit, KOMAU=Komite Audit, KOMIN=Komisaris Independen, Profit=Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance yang diukur menggunakan ETR dikali dengan negatif satu, memiliki rata – rata sebesar -0,25061, artinya dari sampel 19 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit *The Big Four* memiliki nilai rata-rata ETR yang dikali dengan negatif satu sebesar -0,25061. Untuk nilai maksimum *tax avoidance* sebesar -0,023, artinya ETR tertinggi adalah sebesar -0,023 yang ada pada PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) pada tahun 2017. Sedangkan nilai minimum *tax avoidance* sebesar -0,400, artinya ETR terendah adalah sebesar -0,400 yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) pada tahun 2021. Standar deviasi data *tax avoidance* sebesar 0,056148 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data tersebut tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

2. *Leverage*

Leverage yang diukur dengan DER, memiliki rata – rata sebesar 0,78508, artinya dari sampel 19 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit *The Big Four* memiliki nilai rata-rata DER sebesar 0,78508. Untuk nilai maksimum *leverage*

sebesar 3,413, artinya DER tertinggi adalah sebesar 3,413 yaitu berasal dari PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2021. Sedangkan, nilai minimum *leverage* sebesar 0,122, artinya DER terendah adalah sebesar 0,122 yang didapat dari PT Champion Pacific Indonesia Tbk. (IGAR) pada tahun 2020. Standar deviasi *leverage* sebesar 0,708465 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data *leverage* yang diukur dengan DER memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

3. Komite Audit

Komite audit memiliki rata-rata sebesar 0,6989, artinya dari sampel 19 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit *The Big Four* memiliki nilai rata-rata komite audit sebesar 0,6989. Untuk nilai maksimum komite audit sebesar 1,67, artinya nilai tertinggi jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 1,67 yang berasal dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) tahun 2017. Sedangkan, nilai minimum komite audit sebesar 0,33, artinya nilai terendah jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 0,33 didapat dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2020 - 2021. Standar deviasi komite audit sebesar 0,30825 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komite audit memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

4. Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki rata – rata sebesar 0,4233, artinya dari sampel 19 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit *The Big Four* memiliki nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,4233. Untuk nilai maksimum sebesar 0,83 , artinya nilai tertinggi jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,83 yang didapat dari PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) pada tahun 2020 – 2021. Sedangkan nilai minimum komisaris independen yaitu sebesar 0,25, artinya nilai terendah jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,25 yang diperoleh dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2017. Untuk standar deviasi komisaris independen sebesar 0,12210 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komisaris independen tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

5. Profitabilitas

Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki rata – rata sebesar 0,13176, artinya dari sampel 19 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit *The Big Four* memiliki nilai rata-rata ROA sebesar 0,13176. Untuk nilai maksimum yaitu sebesar 0,527, artinya ROA tertinggi adalah sebesar 0,527 yang diperoleh dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2017. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 0,023, artinya ROA terendah adalah sebesar 0,023 diperoleh dari PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) pada tahun . Untuk standar deviasi profitabilitas sebesar 0,100917 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data profitabilitas yang diukur

menggunakan ROA tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

c. Sampel Dengan Kualitas Audit Non *The Big Four*

Kualitas audit Non *The Big Four* pada penelitian kali ini menggunakan skala *dummy* yaitu angka 0. Berikut hasil deskripsi terkait variabel penelitian tersebut:

Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Non *The Big Four*

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	150	-0,559	-0,020	-0,23415	0,064657
Lev	150	0,067	1,873	0,66991	0,427769
QA	150	0	0	0,00	0,000
KOMAU	150	0,33	1,50	0,9346	0,32693
KOMIN	150	0,33	0,67	0,4204	0,10514
Profit	150	0,012	0,364	0,07272	0,052582
Valid N (listwise)	150				

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Keterangan: TA=Tax Avoidance, Lev=Leverage, QA=Kualitas Audit, KOMAU=Komite Audit, KOMIN=Komisaris Independen, Profit=Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance yang diukur menggunakan ETR dikali dengan negatif satu, memiliki rata – rata sebesar -0,23415, artinya dari sampel 30 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit bukan *The Big Four* memiliki nilai rata-rata ETR yang dikali dengan

negatif satu sebesar -0,23415. Untuk nilai maksimum *tax avoidance* sebesar -0,020, artinya ETR tertinggi adalah sebesar -0,020 yang diperoleh dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) pada tahun 2018. Sedangkan, nilai minimum dari *tax avoidance* sebesar -0,559, artinya ETR terendah adalah sebesar -0,559 yaitu PT Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2018. Standar deviasi data *tax avoidance* sebesar 0,064657 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data tersebut tersebar dengan lebih luas atau memiliki variansi yang lebih besar.

2. Leverage

Leverage yang diukur dengan DER, memiliki rata – rata sebesar 0,66991, artinya dari sampel 30 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit bukan *The Big Four* memiliki nilai rata-rata DER sebesar 0,66991. Untuk nilai maksimum *leverage* sebesar 1,873, artinya DER tertinggi adalah sebesar 1,873 yaitu berasal dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) pada tahun 2019. Sedangkan, nilai minimumnya sebesar 0,067, artinya DER terendah sebesar 0,067 diperoleh dari PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. (SCCO) pada tahun 2021. Standar deviasi *leverage* sebesar 0,427769 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data *leverage* yang diukur dengan DER memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

3. Komite Audit

Komite audit memiliki rata – rata sebesar 0,9346, artinya dari sampel 30 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit bukan *The Big Four* memiliki nilai rata-rata komite audit sebesar 0,9346. Untuk nilai maksimum komite audit sebesar

1,50, artinya nilai tertinggi jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 1,50 yaitu berasal dari PT Siantar Top Tbk. (STTP) pada tahun 2017 - 2021, PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) pada tahun 2020 – 2021, PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) pada tahun 2017 – 2021, PT Ekadharma International Tbk. (EKAD) pada tahun 2017 – 2021, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) pada tahun 2017 - 2021. Sedangkan, nilai minimumnya sebesar 0,33, artinya nilai terendah jumlah anggota komite audit di luar komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebesar 0,33 yang didapatkan dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2020 - 2021. Standar deviasi komite audit sebesar 0,32693 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komite audit memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

4. Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki rata – rata sebesar 0,4204, artinya dari sampel 30 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit bukan *The Big Four* memiliki nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,4204. Untuk nilai maksimum sebesar 0,67, artinya nilai tertinggi jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,4204 yang diperoleh dari PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) pada tahun 2017 - 2021, PT Suparma Tbk. (SPMA) pada tahun 2020. Sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 0,33 , artinya nilai terendah jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris sebesar 0,33 yang diperoleh dari PT Aneka Gas Industri Tbk. (AGII) pada tahun 2017 – 2021, PT Intan

Wijaya International Tbk. (INCI) pada tahun 2017 – 2020, PT Indo Acitama Tbk. (SRSN) pada tahun 2019 – 2021, PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) pada tahun 2019, PT Tunas Alfin Tbk. (TALF) pada tahun 2017 – 2021, PT Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2017 – 2021, PT Kedawung Setia Industrial Tbk. (KDSI) pada tahun 2018 – 2019, PT Indospring Tbk. (INDS) pada tahun 2017 – 2020, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. (SCCO) pada tahun 2017 – 2020, PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) pada tahun 2017 - 2021. PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP) pada tahun 2017 – 2021, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) pada tahun 2017 – 2021, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) pada tahun 2017 – 2021, PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) pada tahun 2017 – 2021, PT Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI) pada tahun 2017 – 2021, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) pada tahun 2017 – 2021, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) pada tahun 2017 – 2021. Untuk standar deviasi komisariss independen sebesar 0,10514 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data komisariss independen memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

5. Profitabilitas

Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki rata – rata sebesar 0,07272, artinya dari sampel 30 perusahaan manufaktur dengan kualitas audit bukan *The Big Four* memiliki nilai rata-rata ROA sebesar 0,07272. Untuk nilai maksimum yaitu sebesar 0,364, artinya ROA tertinggi adalah sebesar 0,364 yang diperoleh dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum profitabilitas yaitu sebesar 0,012, artinya ROA terendah adalah sebesar

0,012 yang diperoleh dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) pada tahun 2017. Untuk standar deviasi profitabilitas sebesar 0,052582 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata yang telah diperoleh mengindikasikan bahwa data profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki variabilitas atau penyebaran data yang lebih terbatas.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data penelitian ini telah memiliki distribusi yang normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data yang terdistribusi dapat dikatakan normal. Berikut hasil uji normalitas yang telah dilakukan :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
n		245
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,24053
	Std. Deviation	0,061903
Most Extreme Differences	Absolute	0,132
	Positive	0,132
	Negative	-0,115
Test Statistic		0,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan hasil uji yang telah dilaksanakan, dengan memperhatikan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* diperoleh sebesar 0,000 yang berarti bahwa $0,000 < 0,05$. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Tetapi, menurut Gujarati & Porter (2009) *Central Limit Theorema* (CLT), penelitian yang dilakukan dengan jumlah sampel besar (lebih dari 100) data dianggap terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini, menggunakan data sampel sebanyak 245 data sehingga permasalahan uji normalitas dapat teratasi.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pada model regresi saling memiliki korelasi (Ariawaty & Evita, 2018). Model regresi dapat dikatakan baik bila tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Lev	0,812	1,231
	QA	0,726	1,378
	KOMAU	0,792	1,263

	KOMIN	0,748	1,338
	Profit	0,702	1,424

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Keterangan: TA=Tax Avoidance, Lev=Leverage, QA=Kualitas Audit, KOMAU=Komite Audit, KOMIN=Komisaris Independen, Profit=Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan pada Tabel 4.6, nilai *tolerance* dari seluruh variabel independen $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi atau tidak antara residual pada periode saat ini dengan residual periode sebelumnya ($t-1$). Regresi dapat dikatakan sempurna jika didalamnya tidak mengandung autokorelasi. Uji autokorelasi dapat diuji dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) :

1. Jika $d < dL$ atau $d > 4-dL$, maka terdapat autokorelasi
2. Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak terdapat autokorelasi
3. Jika $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$, maka tidak ada kesimpulan

Berikut hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* :

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Uraian	Hasil
Jumlah observasi (n)	245
Jumlah variabel independen	5
<i>Durbin lower</i> (dL)	1,667

<i>Durbin upper</i> (dU)	1,748
<i>Durbin watson</i> (d)	2,015
4 – D1	2,333
4 – dU	2,252

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* sesuai Tabel 4.7 dan menunjukkan bahwa nilai $dU < d < 4-dU$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ariawaty & Evita, 2018). Model regresi dikatakan baik jika tidak mengandung heteroskedastisitas, untuk mendeteksinya dapat menggunakan menggunakan uji *glejser*, uji *park*, uji *spearman-rho*, uji *white* dan uji *scatterplot*. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas akan menggunakan uji *white* dan uji *scatterplot*.

Uji *white* dilakukan dengan cara meregresi residual kuadrat (U^2t) dengan variabel independen kuadrat dan perkalian variabel independen (Ghozali, 2018). Uji *white* dilakukan untuk mencari *r square* maupun *adjusted r Square* pada model *summary* agar mendapat nilai *chi square*. Rumus yang digunakan yaitu n dikali dengan *r square* jika variabel independen berjumlah maksimal dua, namun jika variabel independen lebih dari dua maka menggunakan rumus n dikali dengan *adjusted r square*. Dimana nilai n tersebut adalah jumlah sampel. Setelah mendapatkan *chi square* hitung selanjutnya mencari nilai *chi square* Tabel dengan

rumus $Df = k - 1$, dimanak merupakan jumlah variabel independen. Serta tentunya memperhatikan tingkat *.sig* yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan 5% atau 0,05.

Dasar pengambilan keputusannya yaitu :

1. Apabila nilai *chi square* hitung < dari nilai *chi square* Tabel, maka tidakterjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Apabila, nilai *chi square* hitung > dari nilai *chi square* Tabel, makaterjadi gejala heteroskedastisitas.

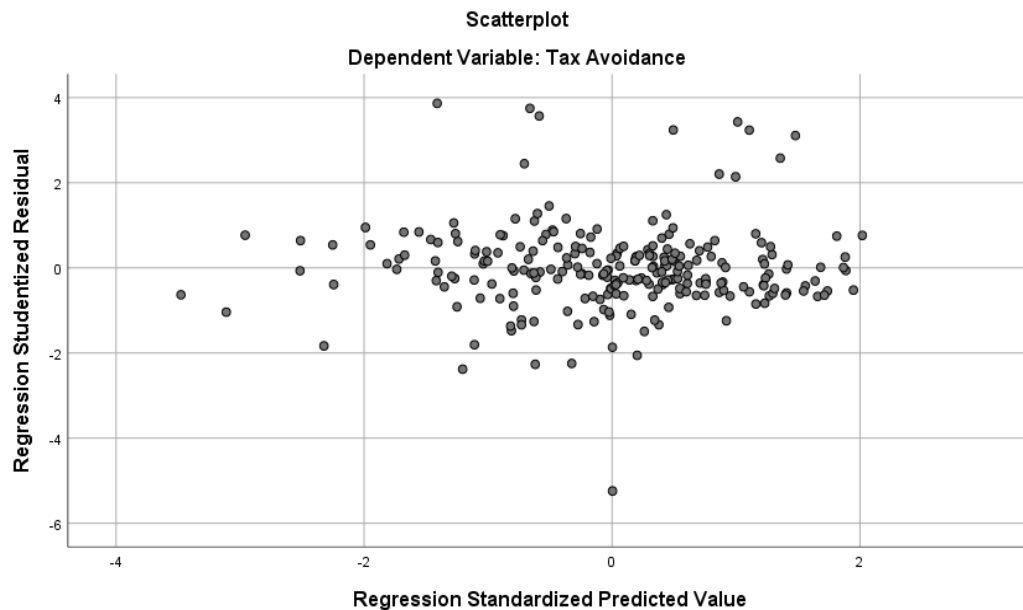
Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uraian	Hasil
<i>R square</i>	0,046
<i>Adjusted R square</i>	0,026
<i>Chi square</i> hitung ($n \times \text{adj } r \text{ square}$)	6,370
<i>Chi square</i> Tabel ($df = k - 1$, sig 5%)	11,070

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *white* pada Tabel 4.8 diperoleh data *chi square* hitung sebesar 6,370 dan *chi square* Tabel sebesar 11,070. Maka dari itu *chi square* hitung < *chi square* Tabel, dapat disimpulkan bahwatidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini. Selain itu kriteria yang dijadikan dasar pengambilan keputusan lainnya yaitu dengan melihat pola pada uji *scatterplot* sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari SPSS 26

Gambar 4. 1 Hasil uji scatterplot

Berdasarkan hasil dari Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tidak terbentuk pola yang jelas, titik – titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0. Sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi yang kecil atau mendekati 0, memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas. Kemudian jika nilai R^2 mendekati 1, memiliki arti bahwa variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tetapi penggunaan nilai R^2 sebagai koefisien determinasi mempunyai kelemahan yaitu nilainya akan terus bertambah seiring bertambahnya variabel independen meskipun variabel yang ditambahkan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Maka dari itu, penggunaan *adjusted R square* lebih direkomendasikan karena lebih kuat terhadap penambahan jumlah variabel independen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji koefisien determinasi ditampilkan pada Tabel 4.9:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,428 ^a	0,183	0,166	0,05753

Sumber : Diolah dari SPSS 26.

Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi pada Tabel 4.9 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,166. Hal ini menunjukkan bahwa variasi *tax avoidance* pada penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel independen yang berupa *leverage*, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas sebesar 16,6%. Adapun sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lainnya di luar penelitian.

4.2.3.2 Uji F

Menentukan signifikan atau tidaknya model dapat dilakukan dengan pengujian uji F. Uji F memiliki tujuan melakukan pengujian apakah sudah sesuai untuk memperkirakan kelayakan model regresi. Jika nilai Sig < 0,05, maka model regresi linear berganda tersebut dapat dilanjutkan sebab tidak mengalami

permasalahan. Berikut ini merupakan hasil uji F yang ditunjukkan dengan Tabel 4.10:

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,241	5	0,058	8,724	0,000 ^b
	Residual	1,181	239	0,008		
	Total	1,422	244			

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai Sig. < 0,05, sehingga model regresi linier berganda dapat dilanjutkan karena tidak mengalami masalah.

4.2.3.3 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda memiliki tujuan guna melakukan pengujian pengaruh *leverage*, *financial distress*, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berikut ini hasil uji regresi linier berganda yang ditunjukkan oleh Tabel 4.11:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,219	-10,669	0,000	-
<i>Leverage</i> (Lev)	-0,011	-1,344	0,180	H1 tidak didukung
Kualitas Audit (QA)	0,026	2,768	0,046	H2 tidak didukung karena berbeda arah dengan koefisien regresi
Komite Audit (KOMA)	0,026	2,035	0,043	H3 didukung

Komisaris Independen (KOMIN)	0,027	0,663	0,508	H4 tidak didukung
Profitabilitas (Profit)	0,076	1,310	0,191	H5 tidak didukung

Sumber : Diolah dari SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut, model persamaan regresi yang dapat dijabarkan berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yaitu seperti berikut :

$$TA = - 0,219 - 0,01 Lev + 0,026 QA + 0,026 KOMAU + 0,027 KOMIN + 0,076 Profit$$

4.2.3.4 Uji t

Pada dasarnya uji t dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau dampak dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig < 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.11 yang telah dilakukan :

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil nilai P-value *leverage* sebesar 0,180 > 0,05. Nilai koefisien regresi *leverage* negatif sebesar 0,011 sehingga H1 tidak didukung, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan Tabel 4.11 nilai P-value kualitas audit sebesar $0,046 < 0,05$ akan tetapi koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,026. H2 tidak didukung namun hasil P-value menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil nilai P-value komite audit sebesar $0,043 < 0,05$. Hasil nilai koefisien regresinya positif sebesar 0,026. sehingga H3 didukung, maka disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil nilai P-value komisaris independen sebesar $0,508 > 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,027 sehingga H4 tidak didukung. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Hasil nilai P-value profitabilitas sebesar $0,191 > 0,05$. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,076 sehingga H5 tidak didukung, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear, nilai P-value *leverage* sebesar $0,180 > 0,05$. Nilai koefisien regresi *leverage* negatif sebesar 0,011 sehingga H1 tidak didukung, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma

& Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut teori trade-off struktur modal, *leverage* berfokus pada bagaimana struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan pengembalian beban atas utang. Sedangkan fokus *tax avoidance* lebih berkaitan pada manajemen perpajakan dan upaya untuk mengoptimalkan posisi perusahaan dari perspektif perpajakan.

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan, (2016), Hidayah, dkk. (2020), dan Hidayanto, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena nilai utang yang dilakukan perusahaan hanya digunakan sebatas dalam rangka pembiayaan modal perusahaan, tidak dilakukan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Pajak Penghasilan. Aturan ini juga dimaksudkan untuk membatasi motif kecurangan praktik *tax avoidance*, atau lebih tepatnya *thin capitalization*. *Thin capitalization* ini sering diartikan pada situasi saat perusahaan melakukan pendanaan dari tingkat utang yang tinggi jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan, atau biasa disebut *highly leveraged* (OECD, 2012). Oleh karena itu, dengan adanya aturan ini perusahaan cenderung mematuhi sehingga penambahan tingkat *leverage* tidak dimaksudkan untuk melakukan *tax avoidance* namun sebatas dalam rangka pembiayaan perusahaan.

4.3.2 Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil nilai P-value kualitas audit sebesar $0,046 < 0,05$ akan tetapi nilai koefisien regresinya positif (beda arah dengan hipotesis) sebesar 0,026, sehingga H2 tidak didukung meskipun hasil P-value menunjukkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman, (2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marfirah & Syam (2016), Mulyani, dkk. (2018), dan Eksandy (2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dimungkinkan karena peraturan perpajakan yang ada di Indonesia masih terlalu kompleks, sehingga sebaik apapun kualitas audit pasti akan ada celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak. Celah tersebut didapat dari konsultasi yang diberikan KAP kepada perusahaan terkait. Karena selain melakukan jasa asuransi akuntan publik juga bisa memberikan jasa lain yang berhubungan dengan informasi perpajakan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, strategi keuangan, dan strategi manajemen perusahaan.

Dalam teori keagenan, masalah agensi akan muncul karena adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajemen (agen). Pemilik tidak selalu memiliki visibilitas penuh atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam hal praktik perpajakan. Hal ini menciptakan risiko bahwa manajemen dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan

kepentingan pemilik, seperti meningkatkan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan manajerial dengan cara mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

KAP memberikan bantuan kepada kliennya yang dimanfaatkan oleh kliennya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. KAP *The Big Four* dari segi pengetahuan mengenai aturan perpajakan dinilai lebih kaya mengenai kelebihan dan kelemahan aturan perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

4.3.3 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil nilai P-value komite audit sebesar $0,043 < 0,05$. Hasil nilai koefisien regresinya positif sebesar 0,026, sehingga H3 didukung. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo, (2018), Cahyono, dkk. (2016), dan Wibawa, dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena semakin banyak jumlah anggota komite audit akan mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan seperti halnya mengurangi beban pajak. Dengan mengurangi beban pajak maka akan menaikkan laba perusahaan.

Sejalan dengan teori keagenan, jumlah anggota komite audit yang lebih besar dapat membawa perspektif yang lebih luas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Keberagaman pandangan dan pengalaman anggota komite dapat membantu dalam menilai lebih komprehensif tindakan manajemen, termasuk dalam hal praktik perpajakan perusahaan. *Tax avoidance* dianggap sebagai suatu tindakan yang

menguntungkan perusahaan dan legal untuk dilakukan karena tidak melanggar undang-undang dan hanya memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang dianggap lemah.

Sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada penelitian ini sudah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* yaitu jumlah anggota komite audit minimal sejumlah 3 orang.

4.3.4 Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil nilai P-value komisaris independen sebesar $0,508 > 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,027 sehingga H4 tidak didukung. Hal ini tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam teori keagenan, komisaris independen adalah orang-orang yang diangkat oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen perusahaan. Komisaris independen bertindak sebagai pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan dan seharusnya bekerja untuk keuntungan pemilik perusahaan secara keseluruhan. Namun dalam konteks penelitian ini, efektivitas komisaris independen tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya saja, tetapi juga oleh independensinya, kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan, dan komitmen mereka untuk bekerja untuk kepentingan pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyanti, dkk. (2020), Maraya & Yendrawati (2016) yang menyatakan bahwa

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dikarenakan tidak semua anggota komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap kinerja manajemen yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan-

4.3.5 Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil nilai P-value profitabilitas sebesar $0,191 > 0,05$. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,076 sehingga H5 tidak didukung. Hal ini tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati, (2018), Permata, dkk. (2018), dan (Ardianti, 2019) yang mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar maupun kecil jika melakukan tindakan *tax avoidance* akan beresiko kehilangan reputasi perusahaannya. Sejalan dengan teori keagenan dimana sikap oportunistik yang dimiliki oleh agen (manajemen) yang biasanya menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. Pihak manajemen selaku agen akan melakukan segala tindakan yang memberikan keuntungan bagi

mereka, maka dari itu semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan membuat manajer lebih berhati-hati untuk tidak melakukan penghindaran pajak.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Analisis dilakukan terhadap beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2017 hingga 2021, terdapat 49 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian sebanyak 245 sampel. Berdasarkan analisis data, pengujian statistik, dan pembahasan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa, variabel kualitas audit dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel lain seperti *leverage*, komisaris independen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI belum mencantumkan laporan keuangan tahunannya secara lengkap selama periode tahun 2017 hingga 2021.
2. Saat pencarian data laporan keuangan perusahaan manufaktur pada website resmi perusahaan itu sendiri sebagian besar ada yang belum diaudit.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh *leverage*, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel independen lain selain variabel yang telah digunakan pada penelitian ini, karena masih belum mencukupi aspek yang memengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan sampel penelitian pada sektor perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain sektor manufaktur.

Selain itu, saran bagi perusahaan untuk lebih mempertimbangkan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dipercaya untuk melakukan audit laporan keuangannya, dan juga lebih memperhatikan *controlling* dan *monitoring* melalui komite audit pada perusahaan dengan memilih anggota komite audit yang kompeten dengan jumlah minimal anggota yang diharuskan sesuai peraturan yang telah ditetapkan adalah 3 orang. Perusahaan juga harus melakukan penunjukan anggota komite audit melalui dewan komisaris dengan lebih selektif, supaya dapat mewujudkan *good corporate governance* yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghusin, N. A. S. (2015). The Impact of Financial Leverage, Growth, and Size on Profitability of Jordanian Industrial Listed Companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(16). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5-i4/1580>
- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JOM Fekon*, 3(1), 2540-2554.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p13>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831– 1859.
- Ariawaty, R. R. N., & Evita, S. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 7(8). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/235>
- Bank Indonesia. (2006). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640 DPNP. Jakarta
- Blouin, J. (2014). *Defining And Measuring Tax Planning Aggressiveness*. National Tax Journal. <https://doi.org/10.17310/ntj.2014.4.06>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran

Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting*, 2(2).

Darussalam. (2017). *Awal Kehadiran Pajak*. <https://News.Ddtc.Co.Id>.
<https://news.ddtc.co.id/awal-kehadiran-pajak-10547>

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.

Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 584–613
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1916917>

Djefris, D., Eliyanora, E., Septriani, Y., Lailaturrahmi, L., & Erlina, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 210-229.

Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019, July 3). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24>

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
<http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>

Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22.

Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 85–171.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
<https://doi.org/10.1016/J.JACCECO.2010.09.002>
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Grasindo
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3, 66–79. <https://doi.org/10.32663/jaz.v3i1.1334>
- Hidayanto, N., Puji, E. A., Endah, W. C., & Erna, W. (2021). The Effect Of Financial Distress And Accounting Conservatism On Tax Avoidance With Leverage As Moderating Variable. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 119(11), 81–86.
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.09>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*. [https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LK PP audited 2021.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LK_PP_audited_2021.pdf). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bima/id/data-publikasi/berita-terbaru/2953-lkpp-tahun-2021.html>
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*. Jakarta

- Kumalasari, K. P., & Sudarma, M. (2013). A Critical Perspective towards Agency Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7197>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 58–66.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Mahpudin, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Pada Periode 2011-2015 . *Journal Of Accounting And Finance*, 1, 118–131.
- Mangoting, Y. (1999). *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15655>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Marfirah, D., & Syam, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–102.
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* , 5(6), 282–287.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.

- Myers, S. C. (2001). Capital structure. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 87–96. <https://doi.org/10.4337/9781785363528.00012>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6808>
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation A Background Paper For Country Tax Administrations. In Tax & Development.*
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 19(1), 10–20. <https://Doi.Org/10.29040/Jap.V19i1.171>
- Pranjoto, G. H. (2013). Analisis Leverage (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Melakukan Akuisisi). *Jurnal NeO-Bis*, 7(1), 1–14.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.

- Rehman, S. S. F. U. (2013). Relationship between Financial Leverage and Financial Performance: Empirical Evidence of Listed Sugar Companies of Pakistan. *Global Journal of Management and Business Reserach Finance*, 13(8), 33–40.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2).
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(1).
- Setiawan, A., & Al-Ahsan, M. K. (2016). Pengaruh Size, Leverage, Profitability , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal EKA CIDA*, 1, 1–16.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*. Jakarta : CV. Alfabeta.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 8(1).
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-315/BEJ/062000
Perihal : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa
- Suryani, S., & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 259–283.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10, 47–62.

- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/850/632>
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). <https://www.banksulutgo.co.id/bankreport/list/laporan-good-corporate-governance.html>
- Widyanita. (2016). *Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5e9a56d0e931e/1038-wajib-pajak-indonesia-di-panama-papers>
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). *Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman*. Media Ekonomi. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness . *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Sampel Data Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
3	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
4	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
5	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
6	EKAD	Ekadharma International Tbk
7	INCI	Intan Wijaya International Tbk
8	SRSN	Indo Acitama Tbk
9	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk
10	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
11	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
12	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
13	TALF	Tunas Alfin Tbk
14	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
15	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
16	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
17	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
18	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
19	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
20	SPMA	Suparma Tbk
21	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
22	INDS	Indospring Tbk
23	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
24	PBRX	Pan Brothers Tbk
25	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
26	ADES	Akasha Wira International Tbk
27	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
28	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
29	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
30	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk

31	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
32	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
33	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
34	MYOR	Mayora Indah Tbk
35	SKLT	Sekar Laut Tbk
36	STTP	Siantar Top Tbk
37	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
38	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
39	GGRM	Gudang Garam Tbk
40	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
41	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
42	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
43	KLBF	Kalbe Farma Tbk
44	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
45	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
46	KINO	Kino Indonesia Tbk
47	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
48	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
49	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk

الجامعة الإسلامية
 Institut Islam Negeri
 Sunan Gunung Jati

Lampiran 2
Perhitungan Variabel *Tax Avoidance*

No	Kode	Tahun	Income Tax Expense	Pre-Tax Income	ETR	TA (ETR * - 1)
1	INTP	2017	427.456.000.000,000	2.287.274.000.000	0,187	- 0,187
		2018	254.291.000.000,000	1.400.228.000.000	0,182	- 0,182
		2019	439.122.000.000,000	2.274.427.000.000	0,193	- 0,193
		2020	341.991.000.000,000	2.148.328.000.000	0,159	- 0,159
		2021	445.506.000.000,000	2.234.002.000.000	0,199	- 0,199
2	SMGR	2017	703.520.449.000,000	2.253.893.318.000	0,312	- 0,312
		2018	1.019.255.000.000,000	4.104.959.323.000	0,248	- 0,248
		2019	824.542.000.000,000	3.195.775.000.000	0,258	- 0,258
		2020	814.307.000.000,000	3.488.650.000.000	0,233	- 0,233
		2021	1.387.790.000.000,000	3.470.137.000.000	0,400	- 0,400
3	ARNA	2017	44.020.031.391,000	166.203.941.034	0,265	- 0,265
		2018	53.522.141.574,000	211.729.940.176	0,253	- 0,253
		2019	73.932.125.865,000	291.607.365.374	0,254	- 0,254
		2020	94.384.895.323,000	420.626.406.830	0,224	- 0,224
		2021	133.670.240.121,000	609.653.614.511	0,219	- 0,219
4	MARK	2017	17.364.731.343,000	64.422.123.842	0,270	- 0,270
		2018	29.304.854.457,000	111.210.294.119	0,264	- 0,264
		2019	30.684.849.485,000	118.687.394.018	0,259	- 0,259
		2020	42.496.995.435,000	186.691.686.387	0,228	- 0,228
		2021	113.428.935.143,000	505.578.068.397	0,224	- 0,224
5	AGII	2017	36.222.000.000,000	133.820.000.000	0,271	- 0,271
		2018	33.265.000.000,000	147.639.000.000	0,225	- 0,225
		2019	34.706.000.000,000	138.137.000.000	0,251	- 0,251
		2020	3.683.000.000,000	96.179.000.000	0,038	- 0,038
		2021	64.413.000.000,000	275.898.000.000	0,233	- 0,233
6	EKAD	2017	26.453.643.952,000	102.649.309.681	0,258	- 0,258
		2018	27.410.228.138,000	101.455.415.901	0,270	- 0,270
		2019	34.431.929.404,000	111.834.501.956	0,308	- 0,308
		2020	27.593.583.956,000	123.522.654.770	0,223	- 0,223

		2021	29.229.678.826,000	137.720.156.180	0,212	- 0,212
7	INCI	2017	5.523.195.214,000	22.077.467.345	0,250	- 0,250
		2018	5.364.743.569,000	22.040.417.272	0,243	- 0,243
		2019	4.225.326.149,000	18.037.062.772	0,234	- 0,234
		2020	8.322.377.876,000	38.393.758.749	0,217	- 0,217
		2021	2.751.814.757,000	13.788.739.152	0,200	- 0,200
8	SRSN	2017	1.270.641.000,000	18.969.208.000	0,067	- 0,067
		2018	12.110.671.000,000	50.845.763.000	0,238	- 0,238
		2019	14.200.531.000,000	57.029.659.000	0,249	- 0,249
		2020	16.875.622.000,000	61.027.867.000	0,277	- 0,277
		2021	5.714.303.000,000	32.257.288.000	0,177	- 0,177
9	UNIC	2017	5.722.381,000	17.653.780	0,324	- 0,324
		2018	10.861.413,000	28.142.043	0,386	- 0,386
		2019	2.356.075,000	13.744.404	0,171	- 0,171
		2020	10.974.728,000	38.269.549	0,287	- 0,287
		2021	15.479.391,000	73.532.108	0,211	- 0,211
10	IGAR	2017	23.388.107.927,000	95.764.791.063	0,244	- 0,244
		2018	17.075.521.722,000	61.747.960.127	0,277	- 0,277
		2019	22.697.694.263,000	83.534.447.014	0,272	- 0,272
		2020	22.396.075.884,000	83.166.786.329	0,269	- 0,269
		2021	31.914.696.805,000	135.948.996.651	0,235	- 0,235
11	IMPC	2017	20.120.487.307,000	111.423.979.247	0,181	- 0,181
		2018	11.936.029.955,000	117.459.959.119	0,102	- 0,102
		2019	40.827.845.760,000	133.973.045.799	0,305	- 0,305
		2020	59.671.603.733,000	175.476.928.095	0,340	- 0,340
		2021	69.432.703.809,000	276.021.681.104	0,252	- 0,252
12	PBID	2017	71.908.740.000,000	302.782.707.000	0,237	- 0,237
		2018	87.383.350.000,000	385.012.265.000	0,227	- 0,227
		2019	74.194.846.000,000	297.821.465.000	0,249	- 0,249
		2020	115.563.777.000,000	489.217.622.000	0,236	- 0,236
		2021	113.361.748.000,000	525.914.220.000	0,216	- 0,216
13	TALF	2017	10.488.314.450,000	31.954.151.234	0,328	- 0,328
		2018	19.278.987.346,000	60.866.228.487	0,317	- 0,317
		2019	12.073.616.141,000	39.529.863.107	0,305	- 0,305

		2020	10.132.359.645,000	28.621.059.866	0,354	- 0,354
		2021	8.661.405.608,000	31.098.991.418	0,279	- 0,279
14	CPIN	2017	758.918.000.000,000	3.259.822.000.000	0,233	- 0,233
		2018	1.355.866.000.000,000	5.907.351.000.000	0,230	- 0,230
		2019	963.064.000.000,000	4.608.641.000.000	0,209	- 0,209
		2020	921.865.000.000,000	4.767.698.000.000	0,193	- 0,193
		2021	1.014.536.000.000,000	4.633.546.000.000	0,219	- 0,219
15	JPFA	2017	632.785.000.000,000	1.740.595.000.000	0,364	- 0,364
		2018	836.638.000.000,000	2.918.114.000.000	0,287	- 0,287
		2019	688.851.000.000,000	2.494.477.000.000	0,276	- 0,276
		2020	457.187.000.000,000	1.679.091.000.000	0,272	- 0,272
		2021	662.951.000.000,000	2.793.847.000.000	0,237	- 0,237
16	ALDO	2017	14.702.210.621,000	38.621.790.950	0,381	- 0,381
		2018	31.997.590.693,000	57.208.486.144	0,559	- 0,559
		2019	31.211.431.854,000	121.937.309.241	0,256	- 0,256
		2020	18.632.194.966,000	83.963.236.519	0,222	- 0,222
		2021	28.997.138.595,000	129.768.148.235	0,223	- 0,223
17	FASW	2017	228.662.496.186,000	824.530.694.900	0,277	- 0,277
		2018	582.722.420.085,000	1.988.090.191.158	0,293	- 0,293
		2019	251.762.339.014,000	1.220.595.729.710	0,206	- 0,206
		2020	9.508.000.000,000	362.807.000.000	0,026	- 0,026
		2021	221.939.000.000,000	836.865.000.000	0,265	- 0,265
18	INKP	2017	43.805.000,000	457.087.000	0,096	- 0,096
		2018	147.549.000,000	735.755.000	0,201	- 0,201
		2019	123.507.000,000	397.897.000	0,310	- 0,310
		2020	89.396.000,000	383.437.000	0,233	- 0,233
		2021	135.596.000,000	662.635.000	0,205	- 0,205
19	KDSI	2017	24.397.862.353,000	93.363.070.902	0,261	- 0,261
		2018	27.193.843.703,000	103.955.745.914	0,262	- 0,262
		2019	30.835.922.008,000	94.926.825.515	0,325	- 0,325
		2020	22.774.416.925,000	82.952.707.385	0,275	- 0,275
		2021	26.036.048.290,000	98.670.516.829	0,264	- 0,264
20	SPMA	2017	29.028.817.395,000	121.308.934.629	0,239	- 0,239
		2018	27.440.595.513,000	109.673.317.782	0,250	- 0,250

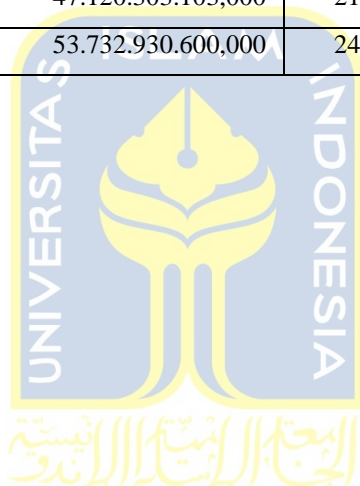
		2019	45.634.690.184,000	176.640.361.124	0,258	- 0,258
		2020	32.978.787.509,000	195.503.438.222	0,169	- 0,169
		2021	83.184.066.580,000	377.509.626.634	0,220	- 0,220
21	TKIM	2017	8.232.000,000	35.542.000	0,232	- 0,232
		2018	5.093.000,000	250.802.000	0,020	- 0,020
		2019	18.182.000,000	184.698.000	0,098	- 0,098
		2020	4.645.000,000	152.979.000	0,030	- 0,030
		2021	8.527.000,000	257.533.000	0,033	- 0,033
22	INDS	2017	46.701.314.660,000	160.340.854.561	0,291	- 0,291
		2018	37.295.885.405,000	147.982.768.771	0,252	- 0,252
		2019	28.605.311.394,000	130.070.871.745	0,220	- 0,220
		2020	16.565.431.238,000	75.316.440.467	0,220	- 0,220
		2021	55.589.488.759,000	213.789.217.074	0,260	- 0,260
23	SMSM	2017	16.525.000.000,000	720.638.000.000	0,023	- 0,023
		2018	194.731.000.000,000	828.281.000.000	0,235	- 0,235
		2019	183.366.000.000,000	822.042.000.000	0,223	- 0,223
		2020	145.152.000.000,000	684.268.000.000	0,212	- 0,212
		2021	193.905.000.000,000	922.168.000.000	0,210	- 0,210
24	PBRX	2017	3.137.669,000	10.954.185	0,286	- 0,286
		2018	4.287.852,000	20.548.035	0,209	- 0,209
		2019	7.320.142,000	24.371.084	0,300	- 0,300
		2020	6.578.130,000	25.945.244	0,254	- 0,254
		2021	5.683.775,000	21.087.537	0,270	- 0,270
25	SCCO	2017	75.500.057.785,000	345.230.356.594	0,219	- 0,219
		2018	89.029.251.172,000	343.024.583.828	0,260	- 0,260
		2019	109.811.425.973,000	413.405.348.304	0,266	- 0,266
		2020	65.905.385.002,000	304.057.871.487	0,217	- 0,217
		2021	34.054.492.772,000	175.817.309.688	0,194	- 0,194
26	ADES	2017	12.853.000.000,000	51.095.000.000	0,252	- 0,252
		2018	17.102.000.000,000	70.060.000.000	0,244	- 0,244
		2019	26.294.000.000,000	110.179.000.000	0,239	- 0,239
		2020	32.130.000.000,000	167.919.000.000	0,191	- 0,191
		2021	72.070.000.000,000	337.828.000.000	0,213	- 0,213
27	CAMP	2017	14.962.380.915,000	58.384.115.529	0,256	- 0,256

		2018	22.091.487.874,000	84.038.783.563	0,263	- 0,263
		2019	22.776.643.675,000	99.535.473.132	0,229	- 0,229
		2020	12.770.532.085,000	56.816.360.398	0,225	- 0,225
		2021	26.090.326.740,000	126.156.941.830	0,207	- 0,207
28	CEKA	2017	35.775.052.527,000	143.195.939.366	0,250	- 0,250
		2018	30.745.155.584,000	123.394.812.359	0,249	- 0,249
		2019	69.673.049.453,000	285.132.249.695	0,244	- 0,244
		2020	51.052.197.134,000	232.864.791.126	0,219	- 0,219
		2021	49.267.827.129,000	236.334.817.214	0,208	- 0,208
29	CLEO	2017	12.168.654.426,000	62.342.385.255	0,195	- 0,195
		2018	18.095.077.841,000	81.356.830.315	0,222	- 0,222
		2019	41.586.377.844,000	172.342.839.552	0,241	- 0,241
		2020	35.841.322.490,000	168.613.556.985	0,213	- 0,213
		2021	49.269.953.667,000	229.981.620.687	0,214	- 0,214
30	HOKI	2017	16.420.307.909,000	64.384.420.849	0,255	- 0,255
		2018	30.627.161.799,000	120.822.298.064	0,253	- 0,253
		2019	38.455.949.448,000	142.179.083.420	0,270	- 0,270
		2020	12.836.262.144,000	50.874.681.549	0,252	- 0,252
		2021	5.464.655.429,000	17.997.743.133	0,304	- 0,304
31	ICBP	2017	1.663.388.000.000,000	5.206.561.000.000	0,319	- 0,319
		2018	1.788.004.000.000,000	6.446.785.000.000	0,277	- 0,277
		2019	2.076.943.000.000,000	7.436.972.000.000	0,279	- 0,279
		2020	2.540.073.000.000,000	9.958.647.000.000	0,255	- 0,255
		2021	2.034.950.000.000,000	9.935.232.000.000	0,205	- 0,205
32	INDF	2017	2.513.491.000.000,000	7.594.822.000.000	0,331	- 0,331
		2018	2.485.115.000.000,000	7.446.966.000.000	0,334	- 0,334
		2019	2.846.668.000.000,000	8.749.397.000.000	0,325	- 0,325
		2020	3.674.268.000.000,000	12.426.334.000.000	0,296	- 0,296
		2021	3.252.500.000.000,000	14.456.085.000.000	0,225	- 0,225
33	MLBI	2017	457.953.000.000,000	1.780.020.000.000	0,257	- 0,257
		2018	447.105.000.000,000	1.671.912.000.000	0,267	- 0,267
		2019	420.553.000.000,000	1.626.612.000.000	0,259	- 0,259
		2020	110.853.000.000,000	396.470.000.000	0,280	- 0,280
		2021	211.931.000.000,000	877.781.000.000	0,241	- 0,241

34	MYOR	2017	555.930.772.581,000	2.186.884.603.474	0,254	- 0,254
		2018	621.507.918.551,000	2.381.942.198.855	0,261	- 0,261
		2019	665.062.374.247,000	2.704.466.581.011	0,246	- 0,246
		2020	585.721.765.291,000	2.683.890.279.936	0,218	- 0,218
		2021	338.595.908.733,000	1.549.648.556.686	0,218	- 0,218
35	SKLT	2017	4.791.040.000,000	27.370.565.356	0,175	- 0,175
		2018	10.383.551.750,000	39.567.679.343	0,262	- 0,262
		2019	14.364.651.250,000	56.782.206.578	0,253	- 0,253
		2020	13.153.736.835,000	55.673.983.557	0,236	- 0,236
		2021	17.201.239.321,000	101.725.399.549	0,169	- 0,169
36	STTP	2017	72.521.739.769,000	288.545.819.603	0,251	- 0,251
		2018	69.605.764.156,000	324.694.650.175	0,214	- 0,214
		2019	124.452.770.582,000	607.043.293.422	0,205	- 0,205
		2020	144.978.315.572,000	773.607.195.121	0,187	- 0,187
		2021	147.614.953.252,000	765.188.720.115	0,193	- 0,193
37	ULTJ	2017	314.550.000.000,000	1.035.192.000.000	0,304	- 0,304
		2018	247.411.000.000,000	949.018.000.000	0,261	- 0,261
		2019	339.494.000.000,000	1.375.359.000.000	0,247	- 0,247
		2020	311.851.000.000,000	1.421.517.000.000	0,219	- 0,219
		2021	265.139.000.000,000	1.541.932.000.000	0,172	- 0,172
38	BUDI	2017	15.325.000.000,000	61.016.000.000	0,251	- 0,251
		2018	21.314.000.000,000	71.781.000.000	0,297	- 0,297
		2019	19.884.000.000,000	83.905.000.000	0,237	- 0,237
		2020	2.219.000.000,000	69.312.000.000	0,032	- 0,032
		2021	22.242.000.000,000	113.965.000.000	0,195	- 0,195
39	GGRM	2017	2.681.165.000.000,000	10.436.512.000.000	0,257	- 0,257
		2018	2.686.174.000.000,000	10.479.242.000.000	0,256	- 0,256
		2019	3.607.032.000.000,000	14.487.736.000.000	0,249	- 0,249
		2020	2.015.404.000.000,000	9.663.133.000.000	0,209	- 0,209
		2021	1.681.525.000.000,000	7.286.846.000.000	0,231	- 0,231
40	HMSP	2017	4.224.272.000.000,000	16.894.806.000.000	0,250	- 0,250
		2018	4.422.851.000.000,000	17.961.269.000.000	0,246	- 0,246
		2019	4.537.910.000.000,000	18.259.423.000.000	0,249	- 0,249
		2020	2.580.088.000.000,000	11.161.466.000.000	0,231	- 0,231

		2021	2.015.069.000.000,000	9.152.166.000.000	0,220	- 0,220
41	WIIM	2017	13.901.517.361,000	54.491.308.212	0,255	- 0,255
		2018	19.587.786.800,000	70.730.637.719	0,277	- 0,277
		2019	15.546.076.147,000	42.874.167.628	0,363	- 0,363
		2020	42.707.905.600,000	215.214.468.586	0,198	- 0,198
		2021	38.007.115.891,000	214.884.126.122	0,177	- 0,177
42	DVLA	2017	63.898.628.000,000	226.147.921.000	0,283	- 0,283
		2018	72.191.936.000,000	272.843.904.000	0,265	- 0,265
		2019	79.466.786.000,000	301.250.035.000	0,264	- 0,264
		2020	51.996.183.000,000	214.069.167.000	0,243	- 0,243
		2021	65.067.999.000,000	211.793.627.000	0,307	- 0,307
43	KLBF	2017	787.935.315.388,000	3.241.186.725.992	0,243	- 0,243
		2018	809.137.704.264,000	3.306.399.669.021	0,245	- 0,245
		2019	865.015.000.888,000	3.402.616.824.533	0,254	- 0,254
		2020	828.010.058.930,000	3.627.632.574.744	0,228	- 0,228
		2021	911.256.951.493,000	4.143.264.634.774	0,220	- 0,220
44	SCPI	2017	58.126.560.000,000	180.641.570.000	0,322	- 0,322
		2018	66.012.339.000,000	193.103.981.000	0,342	- 0,342
		2019	69.334.926.000,000	181.987.452.000	0,381	- 0,381
		2020	70.322.306.000,000	288.685.180.000	0,244	- 0,244
		2021	47.412.267.000,000	166.103.849.000	0,285	- 0,285
45	TSPC	2017	186.750.680.877,000	744.090.262.873	0,251	- 0,251
		2018	187.322.033.018,000	727.700.178.905	0,257	- 0,257
		2019	201.065.998.598,000	796.220.911.472	0,253	- 0,253
		2020	230.078.783.192,000	1.064.448.534.874	0,216	- 0,216
		2021	220.552.779.828,000	1.098.370.417.471	0,201	- 0,201
46	KINO	2017	31.268.949.262,000	140.964.951.060	0,222	- 0,222
		2018	50.269.328.831,000	200.385.373.873	0,251	- 0,251
		2019	120.493.436.530,000	636.096.776.179	0,189	- 0,189
		2020	21.494.720.414,000	135.159.940.052	0,159	- 0,159
		2021	26.486.437.355,000	127.135.975.585	0,208	- 0,208
47	UNVR	2017	2.367.099.000.000,000	9.371.661.000.000	0,253	- 0,253
		2018	3.066.900.000.000,000	12.185.764.000.000	0,252	- 0,252
		2019	2.508.935.000.000,000	9.901.772.000.000	0,253	- 0,253

		2020	2.043.333.000.000,000	9.206.869.000.000	0,222	- 0,222
		2021	1.738.444.000.000,000	7.496.592.000.000	0,232	- 0,232
48	WOOD	2017	62.445.782.633,000	233.877.590.428	0,267	- 0,267
		2018	82.602.301.461,000	324.612.407.710	0,254	- 0,254
		2019	65.639.976.343,000	283.704.289.385	0,231	- 0,231
		2020	96.032.605.001,000	433.714.455.615	0,221	- 0,221
		2021	160.934.700.346,000	704.423.183.701	0,228	- 0,228
49	HRTA	2017	42.390.206.624,000	165.784.070.062	0,256	- 0,256
		2018	42.390.206.624,000	165.784.070.062	0,256	- 0,256
		2019	50.130.174.778,000	200.120.811.411	0,250	- 0,250
		2020	47.120.303.103,000	218.204.833.971	0,216	- 0,216
		2021	53.732.930.600,000	248.165.327.819	0,217	- 0,217



Lampiran 3
Perhitungan Variabel *Leverage*

No	Kode	Tahun	Total Liabilities	Total Equity	DER
1	INTP	2017	4.307.169.000.000	24.556.507.000.000	0,175
		2018	4.566.973.000.000	23.221.589.000.000	0,197
		2019	4.627.488.000.000	23.080.261.000.000	0,200
		2020	5.168.424.000.000	22.176.248.000.000	0,233
		2021	5.515.150.000.000	20.620.964.000.000	0,267
2	SMGR	2017	19.022.617.574.000	30.046.032.639.000	0,633
		2018	18.419.594.705.000	32.736.295.522.000	0,563
		2019	43.915.143.000.000	33.891.924.000.000	1,296
		2020	40.571.674.000.000	35.653.335.000.000	1,138
		2021	34.940.122.000.000	39.782.883.000.000	0,878
3	ARNA	2017	571.946.769.034	1.029.399.792.539	0,556
		2018	556.309.556.626	1.096.596.429.104	0,507
		2019	622.355.306.743	1.176.781.762.600	0,529
		2020	665.401.637.797	1.304.938.651.723	0,510
		2021	670.353.190.326	1.573.169.882.477	0,426
4	MARK	2017	60.755.709.610	166.843.865.684	0,364
		2018	80.342.456.509	237.737.869.956	0,338
		2019	142.230.988.429	299.023.079.312	0,476
		2020	310.254.413.728	409.472.441.871	0,758
		2021	334.818.456.747	743.640.411.602	0,450
5	AGII	2017	2.971.605.000.000	3.358.010.000.000	0,885
		2018	3.499.963.000.000	3.147.792.000.000	1,112
		2019	3.721.416.000.000	3.299.564.000.000	1,128
		2020	3.739.317.000.000	3.382.141.000.000	1,106
		2021	4.581.674.000.000	3.582.925.000.000	1,279
6	EKAD	2017	133.949.920.707	662.817.725.465	0,202
		2018	128.684.953.153	724.582.501.247	0,178
		2019	115.690.798.743	852.543.550.822	0,136
		2020	129.617.262.724	952.362.557.662	0,136

		2021	135.165.299.199	1.030.399.446.064	0,131
7	INCI	2017	35.408.565.186	268.379.825.144	0,132
		2018	71.410.278.158	319.952.419.798	0,223
		2019	65.323.258.479	340.121.790.973	0,192
		2020	75.990.820.673	368.874.979.999	0,206
		2021	131.138.919.060	379.559.681.140	0,346
8	SRSN	2017	237.220.555.000	415.505.899.000	0,571
		2018	208.989.195.000	477.788.016.000	0,437
		2019	264.646.295.000	514.600.563.000	0,514
		2020	318.959.497.000	587.887.398.000	0,543
		2021	251.955.480.000	608.207.428.000	0,414
9	UNIC	2017	885.162.251.508	2.146.161.427.092	0,412
		2018	1.014.795.101.295	2.408.663.727.333	0,421
		2019	614.177.693.448	2.484.841.457.494	0,247
		2020	614.165.636.630	2.802.860.476.325	0,219
		2021	744.148.773.247	3.445.021.270.955	0,216
10	IGAR	2017	71.075.842.431	441.946.749.143	0,161
		2018	87.283.567.361	482.914.243.337	0,181
		2019	80.669.409.164	536.925.371.505	0,150
		2020	72.281.042.223	593.582.375.012	0,122
		2021	117.903.045.612	691.468.538.398	0,171
11	IMPC	2017	1.005.656.523.820	1.289.020.969.663	0,780
		2018	997.975.486.781	1.372.223.331.022	0,727
		2019	1.092.845.023.431	1.408.287.832.788	0,776
		2020	1.231.192.233.990	1.465.907.828.766	0,840
		2021	1.184.949.828.309	1.676.548.380.055	0,707
12	PBID	2017	498.990.179.000	1.319.914.424.000	0,378
		2018	751.597.581.000	1.544.137.386.000	0,487
		2019	670.694.230.000	1.668.225.498.000	0,402
		2020	492.491.798.000	1.928.809.281.000	0,255
		2021	524.108.151.000	2.277.078.807.000	0,230
13	TALF	2017	155.076.156.734	766.164.831.783	0,202
		2018	176.218.785.183	808.378.986.806	0,218
		2019	320.791.791.518	1.008.291.258.921	0,318

		2020	454.287.199.938	1.020.185.316.228	0,445
		2021	522.245.888.520	1.047.684.048.324	0,498
14	CPIN	2017	8.822.202.000.000	15.710.129.000.000	0,562
		2018	8.253.944.000.000	19.391.174.000.000	0,426
		2019	8.213.550.000.000	20.895.858.000.000	0,393
		2020	7.809.608.000.000	23.349.683.000.000	0,334
		2021	10.296.052.000.000	25.149.999.000.000	0,409
15	JPFA	2017	11.297.508.000.000	8.662.040.000.000	1,304
		2018	12.823.219.000.000	10.214.809.000.000	1,255
		2019	14.754.081.000.000	11.896.814.000.000	1,240
		2020	14.539.790.000.000	11.411.970.000.000	1,274
		2021	15.486.946.000.000	13.102.710.000.000	1,182
16	ALDO	2017	269.278.833.819	229.422.823.176	1,174
		2018	254.539.097.693	271.590.217.470	0,937
		2019	391.708.143.237	533.406.306.270	0,734
		2020	363.428.319.392	590.123.647.820	0,616
		2021	507.406.880.546	703.402.561.482	0,721
17	FASW	2017	6.081.574.204.386	3.288.317.572.389	1,849
		2018	6.676.781.411.219	4.288.337.297.565	1,557
		2019	6.059.395.120.910	4.692.597.823.392	1,291
		2020	6.930.049.292.233	4.582.994.996.488	1,512
		2021	8.209.355.000.000	5.092.869.000.000	1,612
18	INKP	2017	59.835.947.772.000	43.592.681.556.000	1,373
		2018	72.107.864.361.000	54.615.554.892.000	1,320
		2019	63.407.852.046.000	33.848.004.570.000	1,873
		2020	59.898.828.990.000	59.941.158.095.000	0,999
		2021	60.388.627.585.000	68.101.898.810.000	0,887
19	KDSI	2017	842.752.226.507	485.539.501.109	1,736
		2018	836.245.435.111	555.171.029.401	1,506
		2019	645.444.999.358	608.205.409.017	1,061
		2020	582.239.031.320	663.468.205.642	0,878
		2021	628.998.263.092	719.731.966.183	0,874
20	SPMA	2017	980.123.282.608	1.172.195.335.156	0,836
		2018	1.013.266.115.558	1.254.609.679.208	0,808

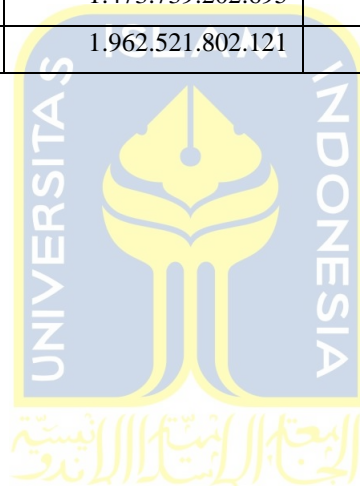
		2019	994.592.156.971	1.377.538.593.804	0,722
		2020	784.672.948.574	1.531.392.057.559	0,512
		2021	930.679.950.301	1.815.473.344.846	0,513
21	TKIM	2017	21.461.860.980.000	13.519.644.036.000	1,587
		2018	25.051.420.431.000	17.886.713.985.000	1,401
		2019	23.649.166.816.000	19.535.824.946.000	1,211
		2020	22.013.490.135.000	21.333.488.085.000	1,032
		2021	20.119.777.656.000	25.129.228.718.000	0,801
22	INDS	2017	289.798.419.319	2.144.818.918.530	0,135
		2018	288.105.732.114	2.194.231.835.853	0,131
		2019	262.135.613.148	2.572.287.128.060	0,102
		2020	262.519.771.935	2.563.740.312.761	0,102
		2021	502.584.655.311	2.662.433.401.892	0,189
23	SMSM	2017	615.157.000.000	1.828.184.000.000	0,336
		2018	650.926.000.000	2.150.277.000.000	0,303
		2019	664.678.000.000	2.442.303.000.000	0,272
		2020	727.016.000.000	2.648.510.000.000	0,275
		2021	957.229.000.000	2.911.633.000.000	0,329
24	PBRX	2017	4.586.748.518.556	3.181.014.799.008	1,442
		2018	4.756.614.182.370	3.628.842.330.312	1,311
		2019	5.559.820.097.018	3.724.850.567.966	1,493
		2020	5.824.497.147.560	3.952.013.049.985	1,474
		2021	5.801.881.886.339	4.167.522.538.674	1,392
25	SCCO	2017	1.286.017.105.712	2.728.227.483.994	0,471
		2018	1.254.447.340.790	2.910.749.138.067	0,431
		2019	1.259.634.682.555	3.141.020.945.591	0,401
		2020	469.705.217.664	3.273.954.601.054	0,143
		2021	296.166.762.993	4.402.697.364.241	0,067
26	ADES	2017	417.225.000.000	423.011.000.000	0,986
		2018	399.361.000.000	481.914.000.000	0,829
		2019	254.438.000.000	567.937.000.000	0,448
		2020	258.283.000.000	700.508.000.000	0,369
		2021	334.291.000.000	969.817.000.000	0,345
27	CAMP	2017	373.272.941.443	837.911.581.216	0,445

		2018	118.853.215.128	885.422.598.655	0,134
		2019	122.136.752.135	935.392.483.851	0,131
		2020	125.161.736.940	961.711.929.701	0,130
		2021	124.445.640.572	1.022.814.971.131	0,122
28	CEKA	2017	489.592.257.434	903.044.187.067	0,542
		2018	192.308.466.864	976.647.575.842	0,197
		2019	261.784.845.240	1.131.294.696.834	0,231
		2020	305.958.833.204	1.260.714.994.864	0,243
		2021	310.020.233.374	1.387.366.962.835	0,223
29	CLEO	2017	362.948.247.159	297.969.528.163	1,218
		2018	198.455.391.702	635.478.469.892	0,312
		2019	478.844.867.693	766.299.436.026	0,625
		2020	416.194.010.942	894.746.110.680	0,465
		2021	346.601.683.606	1.001.579.893.307	0,346
30	HOKI	2017	100.983.030.820	475.980.511.759	0,212
		2018	195.678.977.792	563.167.578.239	0,347
		2019	207.108.590.481	641.567.444.819	0,323
		2020	244.363.297.557	662.560.916.609	0,369
		2021	320.458.715.888	668.660.599.446	0,479
31	ICBP	2017	11.295.184.000.000	20.324.330.000.000	0,556
		2018	11.660.003.000.000	22.707.150.000.000	0,513
		2019	12.038.210.000.000	26.671.104.000.000	0,451
		2020	53.270.272.000.000	50.318.053.000.000	1,059
		2021	63.342.765.000.000	54.723.863.000.000	1,157
32	INDF	2017	41.298.111.000.000	47.102.766.000.000	0,877
		2018	46.620.996.000.000	49.916.800.000.000	0,934
		2019	41.996.071.000.000	54.202.488.000.000	0,775
		2020	83.998.472.000.000	79.138.044.000.000	1,061
		2021	92.724.082.000.000	86.632.111.000.000	1,070
33	MLBI	2017	1.445.173.000.000	1.064.905.000.000	1,357
		2018	1.721.965.000.000	1.167.536.000.000	1,475
		2019	1.750.943.000.000	1.146.007.000.000	1,528
		2020	1.474.019.000.000	1.433.406.000.000	1,028
		2021	1.822.860.000.000	1.099.157.000.000	1,658

34	MYOR	2017	7.561.503.434.179	7.354.346.366.072	1,028
		2018	9.049.161.944.940	8.542.544.481.694	1,059
		2019	9.125.978.611.155	9.911.940.195.318	0,921
		2020	8.506.032.464.592	11.271.468.049.958	0,755
		2021	8.557.621.869.393	11.360.031.396.135	0,753
35	SKLT	2017	328.714.435.982	307.569.774.228	1,069
		2018	408.057.718.435	339.236.007.000	1,203
		2019	410.463.595.860	380.381.947.966	1,079
		2020	366.908.471.713	406.954.570.727	0,902
		2021	347.288.021.564	541.837.229.228	0,641
36	STTP	2017	957.660.374.836	1.384.772.068.360	0,692
		2018	984.801.863.078	1.646.387.946.952	0,598
		2019	733.556.075.974	2.148.007.007.980	0,342
		2020	775.696.860.738	2.673.298.199.144	0,290
		2021	618.395.061.219	3.300.848.622.529	0,187
37	ULTJ	2017	978.185.000.000	4.197.711.000.000	0,233
		2018	780.915.000.000	4.774.956.000.000	0,164
		2019	953.283.000.000	5.655.139.000.000	0,169
		2020	3.972.379.000.000	4.781.737.000.000	0,831
		2021	2.268.730.000.000	5.138.126.000.000	0,442
38	BUDI	2017	1.744.756.000.000	1.194.700.000.000	1,460
		2018	2.166.496.000.000	1.226.484.000.000	1,766
		2019	1.714.449.000.000	1.285.318.000.000	1,334
		2020	1.640.851.000.000	1.322.156.000.000	1,241
		2021	1.605.521.000.000	1.387.697.000.000	1,157
39	GGRM	2017	24.572.266.000.000	42.187.664.000.000	0,582
		2018	23.963.934.000.000	45.133.285.000.000	0,531
		2019	27.716.516.000.000	50.930.758.000.000	0,544
		2020	19.668.941.000.000	58.522.468.000.000	0,336
		2021	30.676.095.000.000	59.288.274.000.000	0,517
40	HMSP	2017	9.028.078.000.000	34.112.985.000.000	0,265
		2018	11.244.167.000.000	35.358.253.000.000	0,318
		2019	15.223.076.000.000	35.679.730.000.000	0,427
		2020	19.432.604.000.000	30.241.426.000.000	0,643

		2021	23.899.022.000.000	29.191.406.000.000	0,819
41	WIIM	2017	247.620.731.930	978.091.361.111	0,253
		2018	250.337.111.893	1.005.236.802.665	0,249
		2019	266.351.031.079	1.033.170.577.477	0,258
		2020	428.590.166.019	1.185.851.841.509	0,361
		2021	572.784.572.607	1.318.385.158.595	0,434
42	DVLA	2017	524.586.078.000	1.116.300.069.000	0,470
		2018	482.559.876.000	1.200.261.863.000	0,402
		2019	523.881.726.000	1.306.078.988.000	0,401
		2020	660.424.729.000	1.326.287.143.000	0,498
		2021	705.106.719.000	1.380.798.261.000	0,511
43	KLBF	2017	2.722.207.633.646	13.894.031.782.689	0,196
		2018	2.851.611.349.015	15.294.594.796.354	0,186
		2019	3.559.144.386.553	16.705.582.476.031	0,213
		2020	4.288.218.173.294	18.276.082.144.080	0,235
		2021	4.400.757.363.148	21.265.877.793.123	0,207
44	SCPI	2017	996.954.246.000	357.150.110.000	2,791
		2018	1.133.297.452.000	502.405.327.000	2,256
		2019	800.703.906.000	617.000.279.000	1,298
		2020	766.072.367.000	832.209.156.000	0,921
		2021	239.608.077.000	972.552.466.000	0,246
45	TSPC	2017	2.352.891.899.876	5.082.008.409.145	0,463
		2018	2.437.126.989.832	5.432.848.070.494	0,449
		2019	2.581.733.610.850	5.791.035.969.893	0,446
		2020	2.727.421.825.611	6.377.235.707.755	0,428
		2021	2.769.022.665.619	6.875.303.997.165	0,403
46	KINO	2017	1.182.424.339.165	2.055.170.880.109	0,575
		2018	1.405.264.079.012	2.186.900.126.396	0,643
		2019	1.992.902.779.331	2.702.862.179.552	0,737
		2020	2.678.123.608.810	2.577.235.546.221	1,039
		2021	2.683.168.655.955	2.663.631.503.097	1,007
47	UNVR	2017	13.733.025.000.000	5.173.388.000.000	2,655
		2018	11.944.837.000.000	7.578.133.000.000	1,576
		2019	15.367.509.000.000	5.281.862.000.000	2,909

		2020	15.597.264.000.000	4.937.368.000.000	3,159
		2021	14.747.263.000.000	4.321.269.000.000	3,413
48	WOOD	2017	1.930.378.027.661	1.912.624.105.680	1,009
		2018	2.138.457.892.658	2.450.039.514.752	0,873
		2019	2.817.941.634.186	2.700.948.590.874	1,043
		2020	2.919.169.404.821	3.029.837.381.689	0,963
		2021	3.158.497.024.662	3.642.537.753.968	0,867
49	HRTA	2017	421.931.875.525	996.515.466.805	0,423
		2018	444.308.333.455	1.092.723.219.024	0,407
		2019	1.099.943.156.591	1.211.246.898.396	0,908
		2020	1.473.739.202.695	1.356.947.214.766	1,086
		2021	1.962.521.802.121	1.515.552.418.426	1,295



Lampiran 4
Perhitungan Variabel Kualitas Audit

No	Kode	Tahun	KAP
1	INTP	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
2	SMGR	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
3	ARNA	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
4	MARK	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
5	AGII	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
6	EKAD	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0

		2021	0
7	INCI	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
8	SRSN	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
9	UNIC	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
10	IGAR	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
11	IMPC	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
12	PBID	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
13	TALF	2017	0
		2018	0
		2019	0

		2020	0
		2021	0
14	CPIN	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
15	JPFA	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
16	ALDO	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
17	FASW	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
18	INKP	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
19	KDSI	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
20	SPMA	2017	0
		2018	0

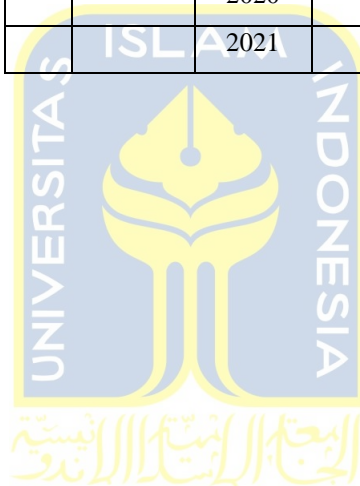
		2019	0
		2020	0
		2021	0
21	TKIM	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
22	INDS	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
23	SMSM	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
24	PBRX	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
25	SCCO	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
26	ADES	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
27	CAMP	2017	0

		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
28	CEKA	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
29	CLEO	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
30	HOKI	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
31	ICBP	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
32	INDF	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
33	MLBI	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1

34	MYOR	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
35	SKLT	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
36	STTP	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
37	ULTJ	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
38	BUDI	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
39	GGRM	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
40	HMSP	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1

		2021	1
41	WIIM	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
42	DVLA	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
43	KLBF	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
44	SCPI	2017	1
		2018	1
		2019	1
		2020	1
		2021	1
45	TSPC	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
46	KINO	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
47	UNVR	2017	1
		2018	1
		2019	1

		2020	1
		2021	1
48	WOOD	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0
49	HRTA	2017	0
		2018	0
		2019	0
		2020	0
		2021	0



Lampiran 5
Perhitungan Variabel Komite Audit

No	Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit		KOMA U
			Diluar Komisaris Independen	Jumlah Komite Audit	
1	INTP	2017	3	7	0,43
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	7	0,43
2	SMGR	2017	4	7	0,57
		2018	4	7	0,57
		2019	4	7	0,57
		2020	5	7	0,71
		2021	3	7	0,43
3	ARNA	2017	3	3	1,00
		2018	3	4	0,75
		2019	3	4	0,75
		2020	3	4	0,75
		2021	3	4	0,75
4	MARK	2017	3	2	1,50
		2018	3	2	1,50
		2019	3	2	1,50
		2020	3	2	1,50
		2021	3	2	1,50
5	AGII	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50
6	EKAD	2017	3	2	1,50
		2018	3	2	1,50
		2019	3	2	1,50
		2020	3	2	1,50

		2021	3	2	1,50
7	INCI	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	2	1,50
8	SRSN	2017	3	8	0,38
		2018	3	8	0,38
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50
9	UNIC	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50
10	IGAR	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
11	IMPC	2017	3	2	1,50
		2018	3	2	1,50
		2019	3	2	1,50
		2020	3	2	1,50
		2021	3	2	1,50
12	PBID	2017	3	2	1,50
		2018	3	2	1,50
		2019	3	3	1,00
		2020	3	2	1,50
		2021	3	2	1,50
13	TALF	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00

		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
14	CPIN	2017	5	3	1,67
		2018	3	3	1,00
		2019	4	3	1,33
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
15	JPFA	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	5	0,60
		2021	3	3	1,00
16	ALDO	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
17	FASW	2017	3	4	0,75
		2018	3	3	1,00
		2019	3	8	0,38
		2020	3	9	0,33
		2021	3	9	0,33
18	INKP	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
19	KDSI	2017	3	4	0,75
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	2	5	0,40
		2021	2	6	0,33
20	SPMA	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60

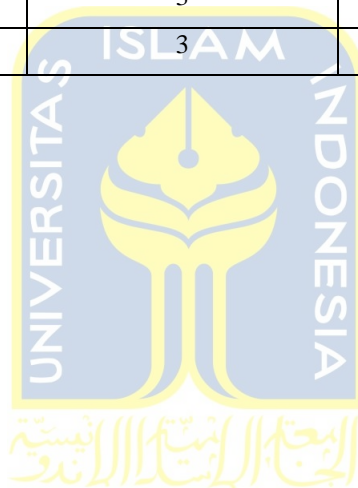
		2019	3	5	0,60
		2020	3	6	0,50
		2021	3	5	0,60
21	TKIM	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
22	INDS	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	4	0,75
23	SMSM	2017	3	3	1,00
		2018	3	2	1,50
		2019	3	2	1,50
		2020	3	2	1,50
		2021	3	2	1,50
24	PBRX	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
25	SCCO	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	4	0,75
26	ADES	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
27	CAMP	2017	3	3	1,00

		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
28	CEKA	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
29	CLEO	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
30	HOKI	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
31	ICBP	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50
32	INDF	2017	3	8	0,38
		2018	3	8	0,38
		2019	3	8	0,38
		2020	3	8	0,38
		2021	3	9	0,33
33	MLBI	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	8	0,38
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50

34	MYOR	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60
		2019	3	5	0,60
		2020	3	5	0,60
		2021	3	5	0,60
35	SKLT	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
36	STTP	2017	3	2	1,50
		2018	3	2	1,50
		2019	3	2	1,50
		2020	3	2	1,50
		2021	3	2	1,50
37	ULTJ	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	4	0,75
		2020	3	4	0,75
		2021	3	4	0,75
38	BUDI	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
39	GGRM	2017	3	4	0,75
		2018	3	4	0,75
		2019	3	4	0,75
		2020	3	4	0,75
		2021	3	4	0,75
40	HMSP	2017	3	5	0,60
		2018	3	6	0,50
		2019	3	7	0,43
		2020	3	4	0,75

		2021	3	4	0,75
41	WIIM	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
42	DVLA	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
43	KLBF	2017	3	8	0,38
		2018	3	6	0,50
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
44	SCPI	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00
45	TSPC	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60
		2019	3	5	0,60
		2020	3	5	0,60
		2021	3	5	0,60
46	KINO	2017	3	4	0,75
		2018	3	4	0,75
		2019	3	4	0,75
		2020	3	4	0,75
		2021	3	4	0,75
47	UNVR	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60
		2019	3	5	0,60

		2020	3	6	0,50
		2021	4	6	0,67
48	WOOD	2017	3	4	0,75
		2018	3	4	0,75
		2019	3	4	0,75
		2020	3	4	0,75
		2021	3	4	0,75
49	HRTA	2017	3	3	1,00
		2018	3	3	1,00
		2019	3	3	1,00
		2020	3	3	1,00
		2021	3	3	1,00



Lampiran 6
Perhitungan Variabel Komisaris Independen

No	Kode	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris	KOMIN
1	INTP	2017	3	7	0,43
		2018	2	6	0,33
		2019	2	6	0,33
		2020	2	6	0,33
		2021	3	7	0,43
2	SMGR	2017	2	7	0,29
		2018	2	7	0,29
		2019	2	7	0,29
		2020	2	7	0,29
		2021	2	7	0,29
3	ARNA	2017	1	3	0,33
		2018	2	4	0,50
		2019	2	4	0,50
		2020	2	4	0,50
		2021	2	4	0,50
4	MARK	2017	1	2	0,50
		2018	1	2	0,50
		2019	1	2	0,50
		2020	1	2	0,50
		2021	1	2	0,50
5	AGII	2017	2	6	0,33
		2018	2	6	0,33
		2019	2	6	0,33
		2020	2	6	0,33
		2021	2	6	0,33
6	EKAD	2017	1	2	0,50
		2018	1	2	0,50
		2019	1	2	0,50
		2020	1	2	0,50

		2021	1	2	0,50
7	INCI	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	2	0,50
8	SRSN	2017	3	8	0,38
		2018	3	8	0,38
		2019	2	6	0,33
		2020	2	6	0,33
		2021	2	6	0,33
9	UNIC	2017	2	6	0,33
		2018	2	6	0,33
		2019	2	6	0,33
		2020	2	6	0,33
		2021	2	6	0,33
10	IGAR	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
11	IMPC	2017	1	2	0,50
		2018	1	2	0,50
		2019	1	2	0,50
		2020	1	2	0,50
		2021	1	2	0,50
12	PBID	2017	1	2	0,50
		2018	1	2	0,50
		2019	1	3	0,33
		2020	1	2	0,50
		2021	1	2	0,50
13	TALF	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33

		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
14	CPIN	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
15	JPFA	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	5	0,60
		2021	3	3	0,33
16	ALDO	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
17	FASW	2017	1	4	0,25
		2018	1	3	0,33
		2019	3	8	0,38
		2020	3	9	0,33
		2021	3	9	0,33
18	INKP	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
19	KDSI	2017	2	4	0,50
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	2	5	0,40
		2021	2	6	0,33
20	SPMA	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60

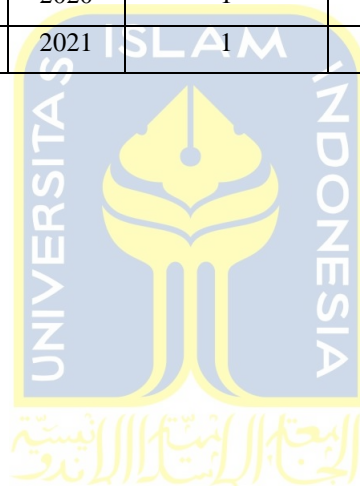
		2019	3	5	0,60
		2020	4	6	0,67
		2021	3	5	0,60
21	TKIM	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
22	INDS	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	2	4	0,50
23	SMSM	2017	1	3	0,33
		2018	1	2	0,50
		2019	1	2	0,50
		2020	1	2	0,50
		2021	1	2	0,50
24	PBRX	2017	2	3	0,67
		2018	2	3	0,67
		2019	2	3	0,67
		2020	2	3	0,67
		2021	2	3	0,67
25	SCCO	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	2	4	0,50
26	ADES	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
27	CAMP	2017	1	3	0,33

		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
28	CEKA	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
29	CLEO	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
30	HOKI	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
31	ICBP	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	3	6	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50
32	INDF	2017	3	8	0,38
		2018	3	8	0,38
		2019	3	8	0,38
		2020	3	8	0,38
		2021	4	9	0,44
33	MLBI	2017	3	6	0,50
		2018	3	6	0,50
		2019	4	8	0,50
		2020	3	6	0,50
		2021	3	6	0,50

34	MYOR	2017	2	5	0,40
		2018	3	5	0,60
		2019	3	5	0,60
		2020	3	5	0,60
		2021	3	5	0,60
35	SKLT	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
36	STTP	2017	1	2	0,50
		2018	1	2	0,50
		2019	1	2	0,50
		2020	1	2	0,50
		2021	1	2	0,50
37	ULTJ	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	2	4	0,50
		2020	2	4	0,50
		2021	2	4	0,50
38	BUDI	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
39	GGRM	2017	2	4	0,50
		2018	2	4	0,50
		2019	2	4	0,50
		2020	2	4	0,50
		2021	2	4	0,50
40	HMSP	2017	2	5	0,40
		2018	2	6	0,33
		2019	3	7	0,43
		2020	2	4	0,50

		2021	2	4	0,50
41	WIIM	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
42	DVLA	2017	3	7	0,43
		2018	3	7	0,43
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
43	KLBF	2017	4	8	0,50
		2018	2	6	0,33
		2019	3	7	0,43
		2020	3	7	0,43
		2021	3	7	0,43
44	SCPI	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33
45	TSPC	2017	3	5	0,60
		2018	3	5	0,60
		2019	2	5	0,40
		2020	3	5	0,60
		2021	3	5	0,60
46	KINO	2017	2	4	0,50
		2018	2	4	0,50
		2019	2	4	0,50
		2020	2	4	0,50
		2021	2	4	0,50
47	UNVR	2017	4	5	0,80
		2018	4	5	0,80
		2019	4	5	0,80

		2020	5	6	0,83
		2021	5	6	0,83
48	WOOD	2017	2	4	0,50
		2018	2	4	0,50
		2019	2	4	0,50
		2020	2	4	0,50
		2021	2	4	0,50
49	HRTA	2017	1	3	0,33
		2018	1	3	0,33
		2019	1	3	0,33
		2020	1	3	0,33
		2021	1	3	0,33



Lampiran 7
Perhitungan Variabel Profitabilitas

No	Kode	Tahun	Profit After Tax	Total Asets	ROA
1	INTP	2017	1.859.818.000.000	28.863.676.000.000	0,064
		2018	1.145.937.000.000	27.788.562.000.000	0,041
		2019	1.835.305.000.000	27.707.749.000.000	0,066
		2020	1.806.337.000.000	27.344.672.000.000	0,066
		2021	1.788.496.000.000	26.136.114.000.000	0,068
2	SMGR	2017	1.650.006.251.000	49.068.650.213.000	0,034
		2018	3.085.704.236.000	51.155.890.227.000	0,060
		2019	2.371.233.000.000	79.807.067.000.000	0,030
		2020	2.674.343.000.000	78.006.244.000.000	0,034
		2021	2.082.347.000.000	76.504.240.000.000	0,027
3	ARNA	2017	122.183.909.643	1.601.346.561.573	0,076
		2018	158.207.798.602	1.652.905.985.730	0,096
		2019	217.675.239.509	1.799.137.069.343	0,121
		2020	326.241.511.507	1.970.340.289.520	0,166
		2021	475.983.374.390	2.243.523.072.803	0,212
4	MARK	2017	47.057.392.499	227.599.575.294	0,207
		2018	81.905.439.662	318.080.326.465	0,257
		2019	88.002.544.535	441.254.067.741	0,199
		2020	144.194.690.952	719.726.855.599	0,200
		2021	392.149.133.254	1.078.458.868.349	0,364
5	AGII	2017	97.598.000.000	6.403.543.000.000	0,015
		2018	114.374.000.000	6.647.755.000.000	0,017
		2019	103.431.000.000	7.020.980.000.000	0,015
		2020	99.862.000.000	7.121.458.000.000	0,014
		2021	211.485.000.000	8.164.599.000.000	0,026
6	EKAD	2017	76.195.665.729	796.767.646.172	0,096
		2018	74.045.187.763	853.267.454.400	0,087
		2019	77.402.572.552	968.234.349.565	0,080
		2020	95.929.070.814	1.081.979.820.386	0,089

		2021	108.490.477.354	1.165.564.745.263	0,093
7	INCI	2017	16.554.272.131	303.788.390.330	0,054
		2018	16.675.673.703	391.362.697.956	0,043
		2019	13.811.736.623	405.445.049.452	0,034
		2020	30.071.380.873	444.865.800.672	0,068
		2021	11.036.924.395	510.698.600.200	0,022
8	SRSN	2017	17.698.567.000	652.726.454.000	0,027
		2018	38.735.092.000	686.777.211.000	0,056
		2019	42.829.128.000	779.246.858.000	0,055
		2020	44.152.245.000	906.846.895.000	0,049
		2021	26.542.985	860.162.908	0,031
9	UNIC	2017	11.931.399	223.746.950	0,053
		2018	17.280.630	236.410.388	0,073
		2019	11.388.329	219.757.421	0,052
		2020	27.294.821	242.256.371	0,113
		2021	58.052.717	292.723.782	0,198
10	IGAR	2017	72.376.683.136	513.022.591.574	0,141
		2018	44.672.438.405	570.197.810.698	0,078
		2019	60.836.752.751	617.594.780.669	0,099
		2020	60.770.710.445	665.863.417.235	0,091
		2021	104.034.299.846	809.371.584.010	0,129
11	IMPC	2017	91.303.491.940	2.294.677.493.483	0,040
		2018	105.523.929.164	2.370.198.817.803	0,045
		2019	93.145.200.039	2.501.132.856.219	0,037
		2020	115.805.324.362	2.697.100.062.756	0,043
		2021	206.588.977.295	1.383.431.547.987	0,149
12	PBID	2017	230.873.967.000	1.818.904.603.000	0,127
		2018	297.628.915.000	2.295.734.967.000	0,130
		2019	223.626.619.000	2.338.919.728.000	0,096
		2020	373.653.845.000	2.421.301.079.000	0,154
		2021	412.552.472.000	2.801.186.958.000	0,147
13	TALF	2017	21.465.836.784	921.240.988.517	0,023
		2018	43.976.734.000	984.597.771.989	0,045
		2019	27.456.246.966	1.329.083.050.439	0,021

		2020	18.488.700.221	1.474.472.516.166	0,013
		2021	22.437.585.810	1.569.929.936.844	0,014
14	CPIN	2017	2.499.875.000.000	24.532.331.000.000	0,102
		2018	4.551.485.000.000	27.645.118.000.000	0,165
		2019	3.642.226.000.000	29.109.408.000.000	0,125
		2020	3.845.833.000.000	31.159.291.000.000	0,123
		2021	3.619.010.000.000	35.446.051.000.000	0,102
15	JPFA	2017	1.043.104.000.000	19.959.548.000.000	0,052
		2018	2.253.201.000.000	23.038.028.000.000	0,098
		2019	1.793.914.000.000	26.650.895.000.000	0,067
		2020	1.221.904.000.000	25.951.760.000.000	0,047
		2021	2.130.896.000.000	28.589.656.000.000	0,075
16	ALDO	2017	29.035.395.397	498.701.656.995	0,058
		2018	42.506.275.523	526.129.315.163	0,081
		2019	78.421.735.355	925.114.449.507	0,085
		2020	65.331.041.553	953.551.967.212	0,069
		2021	100.771.009.640	1.210.809.442.028	0,083
17	FASW	2017	595.868.198.714	9.369.891.776.775	0,064
		2018	1.405.367.771.073	10.965.118.708.784	0,128
		2019	968.833.390.696	10.751.992.944.302	0,090
		2020	353.299.343.980	11.513.044.288.721	0,031
		2021	614.926	13.302.224	0,046
18	INKP	2017	410.582.000	7.634.236.000	0,054
		2018	274.390.000	8.751.013.000	0,031
		2019	294.041.000	8.502.050.000	0,035
		2020	593.101.000	8.496.277.000	0,070
		2021	527.039.000	8.978.445.000	0,059
19	KDSI	2017	68.965.208.549	1.328.291.727.616	0,052
		2018	76.761.902.211	1.391.416.464.512	0,055
		2019	64.090.903.507	1.253.650.408.375	0,051
		2020	60.178.290.460	1.245.707.236.962	0,048
		2021	72.634.468.539	1.348.730.229.275	0,054
20	SPMA	2017	92.280.117.234	2.175.660.855.114	0,042
		2018	82.232.722.269	2.282.845.632.924	0,036

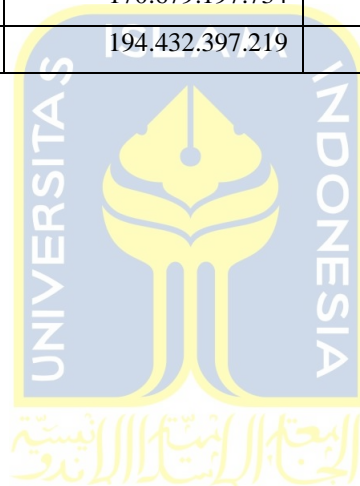
		2019	131.005.670.940	2.372.130.750.775	0,055
		2020	162.524.650.713	2.316.065.006.133	0,070
		2021	294.325.560.054	2.746.153.295.147	0,107
21	TKIM	2017	32.010.000	2.582.042.000	0,012
		2018	245.709.000	2.965.136.000	0,083
		2019	166.516.000	3.062.331.000	0,054
		2020	148.334.000	3.073.164.000	0,048
		2021	249.006.000	3.161.834.000	0,079
22	INDS	2017	113.639.539.901	2.434.617.337.849	0,047
		2018	110.686.883.366	2.482.337.567.967	0,045
		2019	101.465.560.351	2.834.422.741.208	0,036
		2020	158.751.009.229	2.826.260.084.696	0,021
		2021	158.199.728.315	3.165.018.057.203	0,050
23	SMSM	2017	555.388.000.000	2.443.341.000.000	0,227
		2018	63.355.000.000	2.801.203.000.000	0,023
		2019	638.676.000.000	3.106.981.000.000	0,206
		2020	539.116.000.000	3.375.526.000.000	0,160
		2021	728.263.000.000	3.868.862.000.000	0,188
24	PBRX	2017	7.816.516	573.351.293	0,014
		2018	16.260.183	579.066.122	0,028
		2019	17.050.942	658.393.892	0,026
		2020	19.367.114	693.123.729	0,028
		2021	15.403.762	696.625.283	0,022
25	SCCO	2017	269.730.298.809	4.014.244.589.706	0,067
		2018	253.995.332.656	4.165.196.478.857	0,061
		2019	303.593.922.331	4.400.655.628.146	0,069
		2020	238.152.486.485	3.743.659.818.718	0,064
		2021	141.762.816.916	4.698.864.127.234	0,030
26	ADES	2017	38.242.000.000	840.236.000.000	0,046
		2018	52.958.000.000	881.275.000.000	0,060
		2019	83.885.000.000	822.375.000.000	0,102
		2020	135.789.000.000	958.791.000.000	0,142
		2021	265.758.000.000	1.304.108.000.000	0,204
27	CAMP	2017	43.421.734.614	1.211.184.522.659	0,036

		2018	61.947.295.689	1.004.275.813.783	0,062
		2019	76.758.829.457	1.057.529.235.986	0,073
		2020	44.045.828.312	1.086.873.666.641	0,041
		2021	100.066.615.090	1.147.260.611.704	0,087
28	CEKA	2017	107.420.886.839	1.392.636.444.501	0,077
		2018	92.649.656.775	1.168.956.042.706	0,079
		2019	215.459.200.242	1.393.079.542.074	0,155
		2020	181.812.593.992	1.566.673.828.068	0,116
		2021	187.066.990.085	1.697.387.196.209	0,110
29	CLEO	2017	50.173.730.829	660.917.775.322	0,076
		2018	63.261.752.474	833.933.861.594	0,076
		2019	130.756.461.708	1.245.144.303.719	0,105
		2020	132.772.234.495	1.310.940.121.622	0,101
		2021	180.711.667.020	1.348.181.576.913	0,134
30	HOKI	2017	47.964.112.940	576.963.542.579	0,083
		2018	90.195.136.265	758.846.556.031	0,119
		2019	103.723.133.972	848.676.035.300	0,122
		2020	38.038.419.405	906.924.214.166	0,042
		2021	12.533.087.704	989.119.315.334	0,013
31	ICBP	2017	3.543.173.000.000	31.619.514.000.000	0,112
		2018	4.658.781.000.000	34.367.153.000.000	0,136
		2019	5.360.029.000.000	38.709.314.000.000	0,138
		2020	7.418.574.000.000	103.588.325.000.000	0,072
		2021	7.900.282.000.000	118.066.628.000.000	0,067
32	INDF	2017	5.097.264.000.000	88.400.877.000.000	0,058
		2018	4.961.851.000.000	96.537.796.000.000	0,051
		2019	5.902.729.000.000	96.198.559.000.000	0,061
		2020	8.752.066.000.000	163.136.516.000.000	0,054
		2021	11.203.585.000.000	179.356.193.000.000	0,062
33	MLBI	2017	1.322.067.000.000	2.510.078.000.000	0,527
		2018	1.224.807.000.000	2.889.501.000.000	0,424
		2019	1.206.059.000.000	2.896.950.000.000	0,416
		2020	285.617.000.000	2.907.425.000.000	0,098
		2021	665.850.000.000	2.922.017.000.000	0,228

34	MYOR	2017	1.630.953.830.893	14.915.849.800.251	0,109
		2018	1.760.434.280.304	17.591.706.426.634	0,100
		2019	2.051.404.206.764	19.037.918.806.473	0,108
		2020	2.098.168.514.645	19.777.500.514.550	0,106
		2021	1.211.052.647.953	19.917.653.265.528	0,061
35	SKLT	2017	22.970.715.348	636.284.210.210	0,036
		2018	31.954.131.252	747.293.725.435	0,043
		2019	44.943.627.900	790.845.543.826	0,057
		2020	42.520.246.722	773.863.042.440	0,055
		2021	84.524.160.228	889.125.250.792	0,095
36	STTP	2017	216.024.079.834	2.342.432.443.196	0,092
		2018	255.088.886.019	2.631.189.810.030	0,097
		2019	482.590.522.840	2.881.563.083.954	0,167
		2020	628.628.879.549	3.448.995.059.882	0,182
		2021	617.573.766.863	3.919.243.683.748	0,158
37	ULTJ	2017	718.402.000.000	5.175.896.000.000	0,139
		2018	701.607.000.000	5.555.871.000.000	0,126
		2019	1.035.865.000.000	6.608.422.000.000	0,157
		2020	1.109.666.000.000	8.754.116.000.000	0,127
		2021	1.276.793.000.000	7.406.856.000.000	0,172
38	BUDI	2017	45.691.000.000	2.939.456.000.000	0,016
		2018	50.467.000.000	3.392.980.000.000	0,015
		2019	64.021.000.000	2.999.767.000.000	0,021
		2020	67.093.000.000	2.963.007.000.000	0,023
		2021	91.723.000.000	2.993.218.000.000	0,031
39	GGRM	2017	7.755.347.000.000	66.759.930.000.000	0,116
		2018	7.793.068.000.000	69.097.219.000.000	0,113
		2019	10.880.704.000.000	78.647.274.000.000	0,138
		2020	7.647.729.000.000	78.191.409.000.000	0,098
		2021	5.605.321.000.000	89.964.369.000.000	0,062
40	HMSP	2017	12.670.534.000.000	43.141.063.000.000	0,294
		2018	13.538.418.000.000	46.602.420.000.000	0,291
		2019	13.721.513.000.000	50.902.806.000.000	0,270
		2020	8.581.378.000.000	49.674.030.000.000	0,173

		2021	7.137.097.000.000	53.090.428.000.000	0,134
41	WIIM	2017	40.589.790.851	1.225.712.093.041	0,033
		2018	51.142.850.919	1.255.573.914.558	0,041
		2019	27.328.091.481	1.299.521.608.556	0,021
		2020	172.506.562.986	1.614.442.007.528	0,107
		2021	176.877.010.231	1.891.169.731.202	0,094
42	DVLA	2017	162.249.293.000	1.640.886.147.000	0,099
		2018	200.651.968.000	1.682.821.739.000	0,119
		2019	221.783.249.000	1.829.960.714.000	0,121
		2020	162.072.984.000	1.986.711.872.000	0,082
		2021	146.725.628.000	2.085.904.980.000	0,070
43	KLBF	2017	2.453.251.410.604	16.616.239.416.335	0,148
		2018	2.497.261.964.757	18.146.206.145.369	0,138
		2019	2.537.601.823.645	20.264.726.862.584	0,125
		2020	2.799.622.515.814	22.564.300.317.374	0,124
		2021	3.232.007.683.281	25.666.635.156.271	0,126
44	SCPI	2017	122.515.010.000	1.354.104.356.000	0,090
		2018	127.091.642.000	1.635.702.779.000	0,078
		2019	112.652.526.000	1.417.704.185.000	0,079
		2020	218.362.874.000	1.598.281.523.000	0,137
		2021	118.691.582.000	1.212.160.543.000	0,098
45	TSPC	2017	557.339.581.996	7.434.900.309.021	0,075
		2018	540.378.145.887	7.869.975.060.326	0,069
		2019	595.154.912.874	8.372.769.580.743	0,071
		2020	834.369.751.682	9.104.657.533.366	0,092
		2021	877.817.637.643	9.644.326.662.784	0,091
46	KINO	2017	109.696.001.798	3.237.595.219.274	0,034
		2018	150.116.045.042	3.592.164.205.408	0,042
		2019	515.603.339.649	4.695.764.958.883	0,110
		2020	113.665.219.638	5.255.359.155.031	0,022
		2021	100.649.538.230	5.346.800.159.052	0,019
47	UNVR	2017	7.004.562.000.000	18.906.413.000.000	0,370
		2018	9.109.445.000.000	19.522.970.000.000	0,467
		2019	7.392.837.000.000	20.649.371.000.000	0,358

		2020	7.163.536.000.000	20.534.632.000.000	0,349
		2021	5.758.148.000.000	19.068.532.000.000	0,302
48	WOOD	2017	171.431.807.795	3.843.002.133.341	0,045
		2018	242.010.106.249	4.588.497.407.410	0,053
		2019	218.064.313.042	5.518.890.225.060	0,040
		2020	314.373.402.229	5.949.006.786.510	0,053
		2021	535.295.612.635	6.801.034.778.630	0,079
49	HRTA	2017	110.301.225.571	1.418.447.342.330	0,078
		2018	123.393.863.438	1.537.031.552.479	0,080
		2019	149.990.636.633	2.311.190.054.987	0,065
		2020	170.679.197.734	2.830.686.417.461	0,060
		2021	194.432.397.219	3.478.074.220.547	0,056



Lampiran 8
Perhitungan Variabel Penelitian

No	Kode	Tahun	TA	Leverage	QA	KOMAU	KOMIN	Profut
1	INTP	2017	- 0,187	0,175	1	0,43	0,43	0,064
		2018	- 0,182	0,197	1	0,50	0,33	0,041
		2019	- 0,193	0,200	1	0,50	0,33	0,066
		2020	- 0,159	0,233	1	0,50	0,33	0,066
		2021	- 0,199	0,267	1	0,43	0,43	0,068
2	SMGR	2017	- 0,312	0,633	1	0,57	0,29	0,034
		2018	- 0,248	0,563	1	0,57	0,29	0,060
		2019	- 0,258	1,296	1	0,57	0,29	0,030
		2020	- 0,233	1,138	1	0,71	0,29	0,034
		2021	- 0,400	0,878	1	0,43	0,29	0,027
3	ARNA	2017	- 0,265	0,556	1	1,00	0,33	0,076
		2018	- 0,253	0,507	1	0,75	0,50	0,096
		2019	- 0,254	0,529	1	0,75	0,50	0,121
		2020	- 0,224	0,510	1	0,75	0,50	0,166
		2021	- 0,219	0,426	1	0,75	0,50	0,212
4	MARK	2017	- 0,270	0,364	0	1,50	0,50	0,207
		2018	- 0,264	0,338	0	1,50	0,50	0,257
		2019	- 0,259	0,476	0	1,50	0,50	0,199
		2020	- 0,228	0,758	0	1,50	0,50	0,200

		2021	- 0,224	0,450	0	1,50	0,50	0,364
5	AGII	2017	- 0,271	0,885	0	0,50	0,33	0,015
		2018	- 0,225	1,112	0	0,50	0,33	0,017
		2019	- 0,251	1,128	0	0,50	0,33	0,015
		2020	- 0,038	1,106	0	0,50	0,33	0,014
		2021	- 0,233	1,279	0	0,50	0,33	0,026
6	EKAD	2017	- 0,258	0,202	0	1,50	0,50	0,096
		2018	- 0,270	0,178	0	1,50	0,50	0,087
		2019	- 0,308	0,136	0	1,50	0,50	0,080
		2020	- 0,223	0,136	0	1,50	0,50	0,089
		2021	- 0,212	0,131	0	1,50	0,50	0,093
7	INCI	2017	- 0,250	0,132	0	1,00	0,33	0,054
		2018	- 0,243	0,223	0	1,00	0,33	0,043
		2019	- 0,234	0,192	0	1,00	0,33	0,034
		2020	- 0,217	0,206	0	1,00	0,33	0,068
		2021	- 0,200	0,346	0	1,50	0,50	0,022
8	SRSN	2017	- 0,067	0,571	0	0,38	0,38	0,027
		2018	- 0,238	0,437	0	0,38	0,38	0,056
		2019	- 0,249	0,514	0	0,50	0,33	0,055
		2020	- 0,277	0,543	0	0,50	0,33	0,049
		2021	- 0,177	0,414	0	0,50	0,33	0,031

9	UNIC	2017	- 0,324	0,412	1	0,50	0,33	0,053
		2018	- 0,386	0,421	1	0,50	0,33	0,073
		2019	- 0,171	0,247	1	0,50	0,33	0,052
		2020	- 0,287	0,219	1	0,50	0,33	0,113
		2021	- 0,211	0,216	1	0,50	0,33	0,198
10	IGAR	2017	- 0,244	0,161	1	1,00	0,33	0,141
		2018	- 0,277	0,181	1	1,00	0,33	0,078
		2019	- 0,272	0,150	1	1,00	0,33	0,099
		2020	- 0,269	0,122	1	1,00	0,33	0,091
		2021	- 0,235	0,171	1	1,00	0,33	0,129
11	IMPC	2017	- 0,181	0,780	0	1,50	0,50	0,040
		2018	- 0,102	0,727	0	1,50	0,50	0,045
		2019	- 0,305	0,776	0	1,50	0,50	0,037
		2020	- 0,340	0,840	0	1,50	0,50	0,043
		2021	- 0,252	0,707	0	1,50	0,50	0,149
12	PBID	2017	- 0,237	0,378	0	1,50	0,50	0,127
		2018	- 0,227	0,487	0	1,50	0,50	0,130
		2019	- 0,249	0,402	0	1,00	0,33	0,096
		2020	- 0,236	0,255	0	1,50	0,50	0,154
		2021	- 0,216	0,230	0	1,50	0,50	0,147
13	TALF	2017	- 0,328	0,202	0	1,00	0,33	0,023

		2018	- 0,317	0,218	0	1,00	0,33	0,045
		2019	- 0,305	0,318	0	1,00	0,33	0,021
		2020	- 0,354	0,445	0	1,00	0,33	0,013
		2021	- 0,279	0,498	0	1,00	0,33	0,014
14	CPIN	2017	- 0,233	0,562	1	1,67	0,33	0,102
		2018	- 0,230	0,426	1	1,00	0,33	0,165
		2019	- 0,209	0,393	1	1,33	0,33	0,125
		2020	- 0,193	0,334	1	1,00	0,33	0,123
		2021	- 0,219	0,409	1	1,00	0,33	0,102
15	JPFA	2017	- 0,364	1,304	1	0,50	0,50	0,052
		2018	- 0,287	1,255	1	0,50	0,50	0,098
		2019	- 0,276	1,240	1	0,50	0,50	0,067
		2020	- 0,272	1,274	1	0,60	0,60	0,047
		2021	- 0,237	1,182	1	1,00	0,33	0,075
16	ALDO	2017	- 0,381	1,174	0	1,00	0,33	0,058
		2018	- 0,559	0,937	0	1,00	0,33	0,081
		2019	- 0,256	0,734	0	1,00	0,33	0,085
		2020	- 0,222	0,616	0	1,00	0,33	0,069
		2021	- 0,223	0,721	0	1,00	0,33	0,083
17	FASW	2017	- 0,277	1,849	1	0,75	0,25	0,064
		2018	- 0,293	1,557	1	1,00	0,33	0,128

		2019	- 0,206	1,291	1	0,38	0,38	0,090
		2020	- 0,026	1,512	1	0,33	0,33	0,031
		2021	- 0,265	1,612	1	0,33	0,33	0,046
18	INKP	2017	- 0,096	1,373	0	0,43	0,43	0,054
		2018	- 0,201	1,320	0	0,43	0,43	0,031
		2019	- 0,310	1,873	0	0,43	0,43	0,035
		2020	- 0,233	0,999	0	0,43	0,43	0,070
		2021	- 0,205	0,887	0	0,43	0,43	0,059
19	KDSI	2017	- 0,261	1,736	0	0,75	0,50	0,052
		2018	- 0,262	1,506	0	1,00	0,33	0,055
		2019	- 0,325	1,061	0	1,00	0,33	0,051
		2020	- 0,275	0,878	0	0,40	0,40	0,048
		2021	- 0,264	0,874	0	0,33	0,33	0,054
20	SPMA	2017	- 0,239	0,836	0	0,60	0,60	0,042
		2018	- 0,250	0,808	0	0,60	0,60	0,036
		2019	- 0,258	0,722	0	0,60	0,60	0,055
		2020	- 0,169	0,512	0	0,50	0,67	0,070
		2021	- 0,220	0,513	0	0,60	0,60	0,107
21	TKIM	2017	- 0,232	1,587	0	0,43	0,43	0,012
		2018	- 0,020	1,401	0	0,43	0,43	0,083
		2019	- 0,098	1,211	0	0,43	0,43	0,054

		2020	- 0,030	1,032	0	0,43	0,43	0,048
		2021	- 0,033	0,801	0	0,43	0,43	0,079
22	INDS	2017	- 0,291	0,135	0	1,00	0,33	0,047
		2018	- 0,252	0,131	0	1,00	0,33	0,045
		2019	- 0,220	0,102	0	1,00	0,33	0,036
		2020	- 0,220	0,102	0	1,00	0,33	0,021
		2021	- 0,260	0,189	0	0,75	0,50	0,050
23	SMSM	2017	- 0,023	0,336	1	1,00	0,33	0,227
		2018	- 0,235	0,303	1	1,50	0,50	0,023
		2019	- 0,223	0,272	1	1,50	0,50	0,206
		2020	- 0,212	0,275	1	1,50	0,50	0,160
		2021	- 0,210	0,329	1	1,50	0,50	0,188
24	PBRX	2017	- 0,286	1,442	0	1,00	0,67	0,014
		2018	- 0,209	1,311	0	1,00	0,67	0,028
		2019	- 0,300	1,493	0	1,00	0,67	0,026
		2020	- 0,254	1,474	0	1,00	0,67	0,028
		2021	- 0,270	1,392	0	1,00	0,67	0,022
25	SCCO	2017	- 0,219	0,471	0	1,00	0,33	0,067
		2018	- 0,260	0,431	0	1,00	0,33	0,061
		2019	- 0,266	0,401	0	1,00	0,33	0,069
		2020	- 0,217	0,143	0	1,00	0,33	0,064

		2021	- 0,194	0,067	0	0,75	0,50	0,030
26	ADES	2017	- 0,252	0,986	0	1,00	0,33	0,046
		2018	- 0,244	0,829	0	1,00	0,33	0,060
		2019	- 0,239	0,448	0	1,00	0,33	0,102
		2020	- 0,191	0,369	0	1,00	0,33	0,142
		2021	- 0,213	0,345	0	1,00	0,33	0,204
27	CAMP	2017	- 0,256	0,445	0	1,00	0,33	0,036
		2018	- 0,263	0,134	0	1,00	0,33	0,062
		2019	- 0,229	0,131	0	1,00	0,33	0,073
		2020	- 0,225	0,130	0	1,00	0,33	0,041
		2021	- 0,207	0,122	0	1,00	0,33	0,087
28	CEKA	2017	- 0,250	0,542	1	1,00	0,33	0,077
		2018	- 0,249	0,197	1	1,00	0,33	0,079
		2019	- 0,244	0,231	1	1,00	0,33	0,155
		2020	- 0,219	0,243	1	1,00	0,33	0,116
		2021	- 0,208	0,223	1	1,00	0,33	0,110
29	CLEO	2017	- 0,195	1,218	0	1,00	0,33	0,076
		2018	- 0,222	0,312	0	1,00	0,33	0,076
		2019	- 0,241	0,625	0	1,00	0,33	0,105
		2020	- 0,213	0,465	0	1,00	0,33	0,101
		2021	- 0,214	0,346	0	1,00	0,33	0,134

30	HOKI	2017	- 0,255	0,212	0	1,00	0,33	0,083
		2018	- 0,253	0,347	0	1,00	0,33	0,119
		2019	- 0,270	0,323	0	1,00	0,33	0,122
		2020	- 0,252	0,369	0	1,00	0,33	0,042
		2021	- 0,304	0,479	0	1,00	0,33	0,013
31	ICBP	2017	- 0,319	0,556	1	0,50	0,50	0,112
		2018	- 0,277	0,513	1	0,50	0,50	0,136
		2019	- 0,279	0,451	1	0,50	0,50	0,138
		2020	- 0,255	1,059	1	0,50	0,50	0,072
		2021	- 0,205	1,157	1	0,50	0,50	0,067
32	INDF	2017	- 0,331	0,877	1	0,38	0,38	0,058
		2018	- 0,334	0,934	1	0,38	0,38	0,051
		2019	- 0,325	0,775	1	0,38	0,38	0,061
		2020	- 0,296	1,061	1	0,38	0,38	0,054
		2021	- 0,225	1,070	1	0,33	0,44	0,062
33	MLBI	2017	- 0,257	1,357	1	0,50	0,50	0,527
		2018	- 0,267	1,475	1	0,50	0,50	0,424
		2019	- 0,259	1,528	1	0,38	0,50	0,416
		2020	- 0,280	1,028	1	0,50	0,50	0,098
		2021	- 0,241	1,658	1	0,50	0,50	0,228
34	MYOR	2017	- 0,254	1,028	0	0,60	0,40	0,109

		2018	- 0,261	1,059	0	0,60	0,60	0,100
		2019	- 0,246	0,921	0	0,60	0,60	0,108
		2020	- 0,218	0,755	0	0,60	0,60	0,106
		2021	- 0,218	0,753	0	0,60	0,60	0,061
35	SKLT	2017	- 0,175	1,069	0	1,00	0,33	0,036
		2018	- 0,262	1,203	0	1,00	0,33	0,043
		2019	- 0,253	1,079	0	1,00	0,33	0,057
		2020	- 0,236	0,902	0	1,00	0,33	0,055
		2021	- 0,169	0,641	0	1,00	0,33	0,095
36	STTP	2017	- 0,251	0,692	0	1,50	0,50	0,092
		2018	- 0,214	0,598	0	1,50	0,50	0,097
		2019	- 0,205	0,342	0	1,50	0,50	0,167
		2020	- 0,187	0,290	0	1,50	0,50	0,182
		2021	- 0,193	0,187	0	1,50	0,50	0,158
37	ULTJ	2017	- 0,304	0,233	0	1,00	0,33	0,139
		2018	- 0,261	0,164	0	1,00	0,33	0,126
		2019	- 0,247	0,169	0	0,75	0,50	0,157
		2020	- 0,219	0,831	0	0,75	0,50	0,127
		2021	- 0,172	0,442	0	0,75	0,50	0,172
38	BUDI	2017	- 0,251	1,460	0	1,00	0,33	0,016
		2018	- 0,297	1,766	0	1,00	0,33	0,015

		2019	- 0,237	1,334	0	1,00	0,33	0,021
		2020	- 0,032	1,241	0	1,00	0,33	0,023
		2021	- 0,195	1,157	0	1,00	0,33	0,031
39	GGRM	2017	- 0,257	0,582	1	0,75	0,50	0,116
		2018	- 0,256	0,531	1	0,75	0,50	0,113
		2019	- 0,249	0,544	1	0,75	0,50	0,138
		2020	- 0,209	0,336	1	0,75	0,50	0,098
		2021	- 0,231	0,517	1	0,75	0,50	0,062
40	HMSP	2017	- 0,250	0,265	1	0,60	0,40	0,294
		2018	- 0,246	0,318	1	0,50	0,33	0,291
		2019	- 0,249	0,427	1	0,43	0,43	0,270
		2020	- 0,231	0,643	1	0,75	0,50	0,173
		2021	- 0,220	0,819	1	0,75	0,50	0,134
41	WIIM	2017	- 0,255	0,253	0	1,00	0,33	0,033
		2018	- 0,277	0,249	0	1,00	0,33	0,041
		2019	- 0,363	0,258	0	1,00	0,33	0,021
		2020	- 0,198	0,361	0	1,00	0,33	0,107
		2021	- 0,177	0,434	0	1,00	0,33	0,094
42	DVLA	2017	- 0,283	0,470	1	0,43	0,43	0,099
		2018	- 0,265	0,402	1	0,43	0,43	0,119
		2019	- 0,264	0,401	1	0,43	0,43	0,121

		2020	- 0,243	0,498	1	0,43	0,43	0,082
		2021	- 0,307	0,511	1	0,43	0,43	0,070
43	KLBF	2017	- 0,243	0,196	1	0,38	0,50	0,148
		2018	- 0,245	0,186	1	0,50	0,33	0,138
		2019	- 0,254	0,213	1	0,43	0,43	0,125
		2020	- 0,228	0,235	1	0,43	0,43	0,124
		2021	- 0,220	0,207	1	0,43	0,43	0,126
44	SCPI	2017	- 0,322	2,791	1	1,00	0,33	0,090
		2018	- 0,342	2,256	1	1,00	0,33	0,078
		2019	- 0,381	1,298	1	1,00	0,33	0,079
		2020	- 0,244	0,921	1	1,00	0,33	0,137
		2021	- 0,285	0,246	1	1,00	0,33	0,098
45	TSPC	2017	- 0,251	0,463	0	0,60	0,60	0,075
		2018	- 0,257	0,449	0	0,60	0,60	0,069
		2019	- 0,253	0,446	0	0,60	0,40	0,071
		2020	- 0,216	0,428	0	0,60	0,60	0,092
		2021	- 0,201	0,403	0	0,60	0,60	0,091
46	KINO	2017	- 0,222	0,575	0	0,75	0,50	0,034
		2018	- 0,251	0,643	0	0,75	0,50	0,042
		2019	- 0,189	0,737	0	0,75	0,50	0,110
		2020	- 0,159	1,039	0	0,75	0,50	0,022

		2021	- 0,208	1,007	0	0,75	0,50	0,019
47	UNVR	2017	- 0,253	2,655	1	0,60	0,80	0,370
		2018	- 0,252	1,576	1	0,60	0,80	0,467
		2019	- 0,253	2,909	1	0,60	0,80	0,358
		2020	- 0,222	3,159	1	0,50	0,83	0,349
		2021	- 0,232	3,413	1	0,67	0,83	0,302
48	WOOD	2017	- 0,267	1,009	0	0,75	0,50	0,045
		2018	- 0,254	0,873	0	0,75	0,50	0,053
		2019	- 0,231	1,043	0	0,75	0,50	0,040
		2020	- 0,221	0,963	0	0,75	0,50	0,053
		2021	- 0,228	0,867	0	0,75	0,50	0,079
49	HRTA	2017	- 0,256	0,423	0	1,00	0,33	0,078
		2018	- 0,256	0,407	0	1,00	0,33	0,080
		2019	- 0,250	0,908	0	1,00	0,33	0,065
		2020	- 0,216	1,086	0	1,00	0,33	0,060
		2021	- 0,217	1,295	0	1,00	0,33	0,056

Lampiran 9
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Semua Sampel Penelitian

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	245	-,559	-,020	-,24053	,061903
Leverage	245	,067	3,413	,71457	,555219
Kualitas Audit	245	0	1	,39	,488
Komite Audit	245	,33	1,67	,8432	,33928
Komisaris Independen	245	,25	,83	,4215	,11178
Profitabilitas	245	,012	,527	,09561	,080266
Valid n (listwise)	245				

b. Sampel Dengan Kualitas Audit *The Big Four*

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	95	-,400	-,023	-,25061	,056148
Leverage	95	,122	3,413	,78508	,708465
Kualitas Audit	95	1	1	1,00	,000
Komite Audit	95	,33	1,67	,6989	,30825
Komisaris Independen	95	,25	,83	,4233	,12210
Profitabilitas	95	,023	,527	,13176	,100917
Valid n (listwise)	95				

c. Sampel Dengan Kualitas Audit *Non The Big Four*

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	150	-,559	-,020	-,23415	,064657
Leverage	150	,067	1,873	,66991	,427769
Kualitas Audit	150	0	0	,00	,000
Komite Audit	150	,33	1,50	,9346	,32693
Komisaris Independen	150	,33	,67	,4204	,10514
Profitabilitas	150	,012	,364	,07272	,052582
Valid n (listwise)	150				

Lampiran 10

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		245
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,24053
	Std. Deviation	,061903
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,132
	Negative	-,115
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-,219	,021		-10,669	,000		
	Lev	-,011	,008	-,094	-1,344	,180	,812	1,231
	QA	,026	,009	,206	2,768	,046	,726	1,378
	KOMAU	,026	,013	,145	2,035	,043	,792	1,263
	KOMIN	,027	,041	,048	,663	,508	,748	1,338
	Profit	,076	,058	,099	1,310	,191	,702	1,424

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,428 ^a	,183	,166	,05753	2,015

a. Predictors: (Constant), Lev, QA, KOMIN, KOMAU, Profit

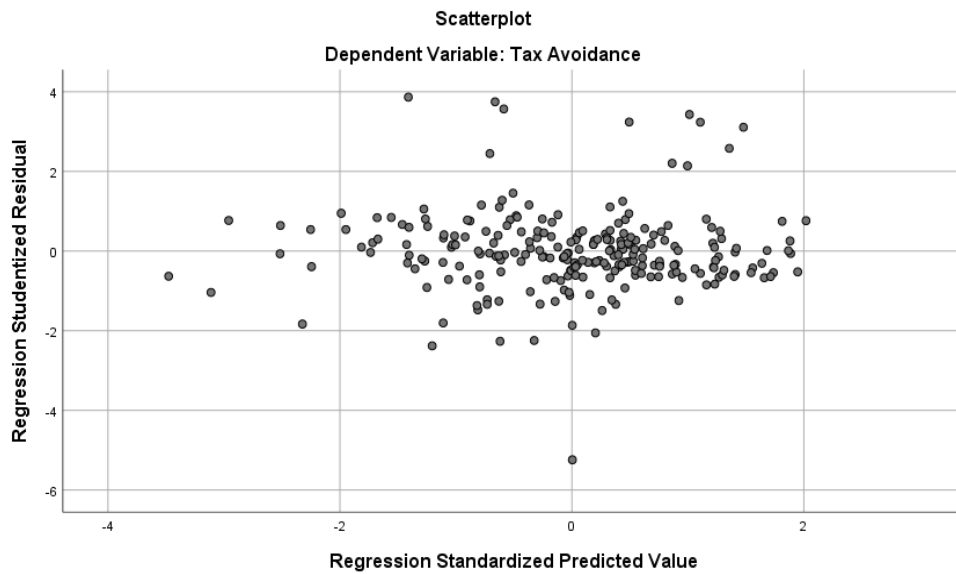
b. Dependent Variable: TA

d. Uji Heteroskedesitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,215 ^a	,046	,026	,40231

a. Predictors: (Constant), Lev, QA, KOMIN, KOMAU, Profit



Lampiran 11

Hasil Analisis Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 ^a	,183	,166	,05753

a. Predictors: (Constant), Lev, QA, KOMIN, KOMAU, Profit

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,241	5	,058	8,724	,000 ^b
	Residual	1,181	239	,008		
	Total	1,422	244			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komite Audit, Leverage, Komisar Independen, Kualitas Audit



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,219	,021		-10,669	,000		
	Lev	-,011	,008	-,094	-1,344	,180	,812	1,231
	QA	,026	,009	,206	2,768	,046	,726	1,378
	KOMAU	,026	,013	,145	2,035	,043	,792	1,263
	KOMIN	,027	,041	,048	,663	,508	,748	1,338
	Profit	,076	,058	,099	1,310	,191	,702	1,424

a. Dependent Variable: Tax Avoidance